



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai bagian dari proses perencanaan Pembangunan daerah yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data.

Penyusunan Renstra ini merupakan implementasi dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, dengan menitikberatkan pada peran strategis Bappeda sebagai institusi penggerak perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, Renstra ini dimaksudkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan daerah. Penyusunannya dilakukan secara terarah, berbasis pada data dan informasi yang akurat, mempertimbangkan dinamika Pembangunan nasional dan daerah, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Rancangan Akhir ini juga memuat arah kebijakan, strategi, dan sasaran kinerja yang dirancang untuk mendukung terwujudnya Pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam proses konsultasi dan penyempurnaan selanjutnya, serta menjadi kontribusi nyata

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan tata kelola Pembangunan daerah yang adaptif dan responsif terhadap tantangan masa depan.

Tenggarong, Januari 2026

Plt. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara,



Sy. Vancesa Vilna SIS, S.E,M.M

NIP. 197402171997032004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	24
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana.....	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	56
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	57
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	59
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
2.2.2 Isu Strategis	62
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69
3.1 Tujuan Renstra PD.....	72
3.2 Sasaran Renstra PD.....	72

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029.....	78
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	84
3.4.1 Kebijakan Pembangunan Daerah.....	84
3.4.2 Pelaksanaan Program Dedikasi.....	88
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN.....	93
4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	93
4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	182
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	328
4.3.1 Indikator Kinerja Utama	329
4.3.2 Indikator Kinerja Kunci	331
BAB V PENUTUP	333

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025	24
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kepangkatan, 2025	25
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Tingkat Pendidikan, 2025	27
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang Menduduki Jabatan Eselon, 2025.....	28
Tabel 2.5 Data Aset Kondisi Baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2025	29
Tabel 2.6 Data Aset Kondisi Rusak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2025	36
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	43
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara	49
Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah	59
Tabel 2.10 Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah	62
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	74
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	79
Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan	84
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Program Unggulan KDH (Program Dedikasi) Masing-masing Bidang Perencanaan, 2025-2029	90
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	140

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	182
Tabel 4.4 Target Kinerja Program Dedikasi	195
Tabel 4.5 Target Kinerja Program Dedikasi	323
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama	330
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci	332

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan Pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Lebih lanjut, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD setelah pelantikan kepala daerah. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

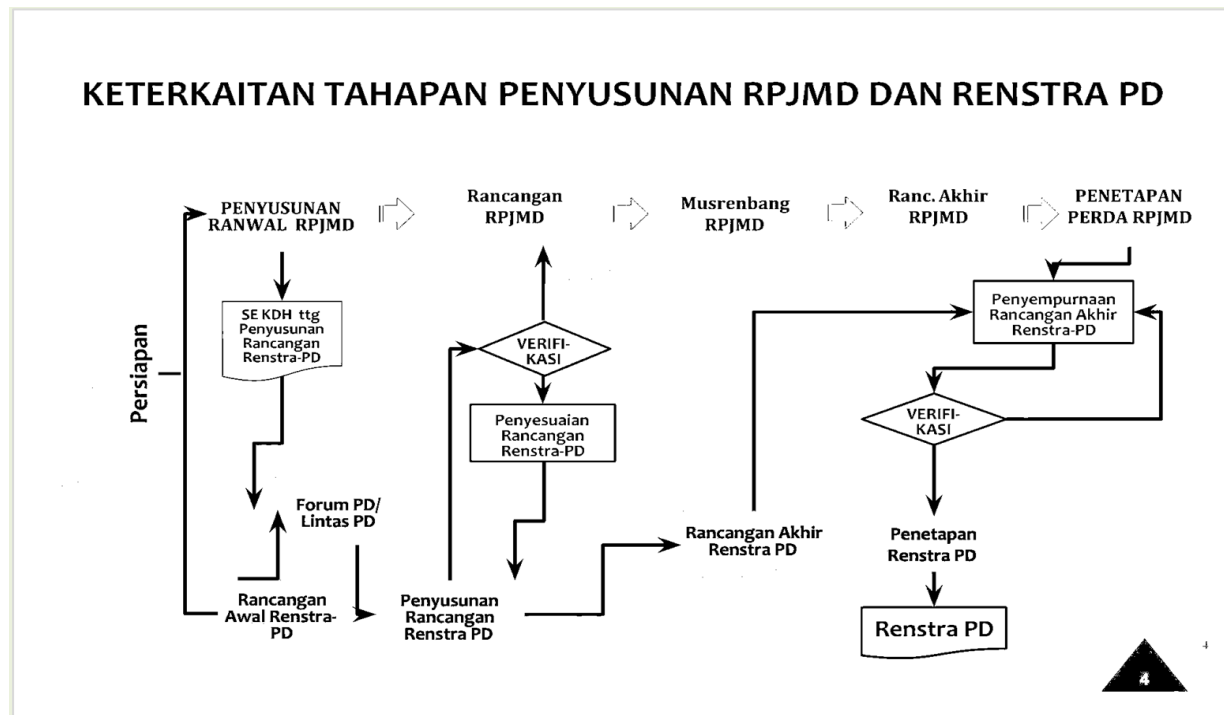
Demikian halnya dengan Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun suatu dokumen perencanaan Pembangunan yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun yang diimplementasikan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun secara tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini dilaksanakan dalam momentum penting, yaitu setelah selesainya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara telah secara resmi menetapkan dr. Aulia Rahman Basri dan H. Rendi Solihin sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan 2025-2030, yang

kemudian dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur, pada tanggal 23 Juni 2025.

Pelantikan ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru yang membawa visi dan misi Pembangunan yang segar, sebagaimana ditekankan oleh Gubernur dalam sambutannya mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Visi kepemimpinan baru ini, yang berfokus pada potensi besar Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), menuntut adanya penyesuaian strategi dan program di setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, Renstra ini disusun sebagai instrumen vital untuk menterjemahkan visi dan misi kepemimpinan baru tersebut ke dalam program kerja konkret, khususnya dalam perencanaan Pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah

Keterkaitan antara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mencerminkan hubungan strategis dan teknis yang mendukung sinergi perencanaan Pembangunan di tingkat daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan arahan dari RPJMD, yang menjadi dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Pembangunan daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimulai dengan merujuk pada Rancangan Akhir RPJMD, yang kemudian disesuaikan dengan hasil musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

Proses ini melibatkan koordinasi antara lintas perangkat daerah, forum perangkat daerah, dan evaluasi substansi melalui tahap verifikasi. Setelah Rancangan Akhir RPJMD disahkan menjadi Perda RPJMD, perangkat daerah melakukan penyempurnaan Renstra agar selaras dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran Pembangunan daerah secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Sinergi ini memastikan bahwa perencanaan Pembangunan berjalan secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tahapan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pada Pasal 108 hingga 124. Prosedur ini melibatkan serangkaian tahapan yang terukur untuk memastikan kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan.

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap terakhir adalah penetapan Rancangan Akhir Renstra menjadi dokumen resmi paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Penetapan ini dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Dinas, yang menjadi dasar hukum dan legitimasi bagi pelaksanaan semua program dan kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan penetapan ini, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah resmi menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6757);
 4. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6.263);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
 9. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

- tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1.312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1.447); yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; (Lembaran Daerah tahun 2025 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

- 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 Nomor 177);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 Nomor 163);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 Nomor 180 , Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 90).
 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan Pembangunan jangka menengah di bidang perencanaan Pembangunan daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan dokumen ini, perencanaan Pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik

(*good governance*), pengentasan kemiskinan, pengarusutamaan gender dan Pembangunan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

Renstra ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan berikut:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang perencanaan Pembangunan daerah.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran Pembangunan bidang perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan Pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah
8. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan perencanaan Pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi:

- 1) Latar Belakang: pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Plafond Lima Tahun Renstra.
- 2) Dasar Hukum Penyusunan: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 3) Maksud dan Tujuan: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 4) Sistematika Penulisan: Uraian garis besar isi dokumen.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini meliputi:

- 1) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a) Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah;
 - b) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - c) Kelompok sasaran layanan
 - d) Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
 - e) Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
 - f) Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

2) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b) Isu strategis.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya dalam tabel. Menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana uraian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Menguraikan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V: PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan badan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas membantu Bupati Kutai Kartanegara melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi pokok :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan
 - b. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang perencanaan
 - c. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi di bidang perencanaan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
6. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Berdasarkan susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta pelaksanaan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi di bidang perencanaan;
- b. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang perencanaan;
- c. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang perencanaan;
- f. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- g. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah baik secara tertulis maupun lisan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik,

- tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
- administrasi umum perangkat Daerah;
 - Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
 - perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
 - administrasi keuangan Perangkat Daerah.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan

- melaporkan progres penataan dan penertiban aset Perangkat Daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan.
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:
- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan

- masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan.
4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perencanaan pemerintahan dan Pembangunan manusia.
- Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perencanaan pemerintahan dan Pembangunan manusia;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan pemerintahan dan Pembangunan manusia;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan perencanaan pemerintahan dan Pembangunan manusia;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang perencanaan pemerintahan dan Pembangunan manusia yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan perencanaan pemerintahan dan Pembangunan manusia;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya

- j. yang diberikan oleh Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan.
5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
- Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:
- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan.

6. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan daerah.

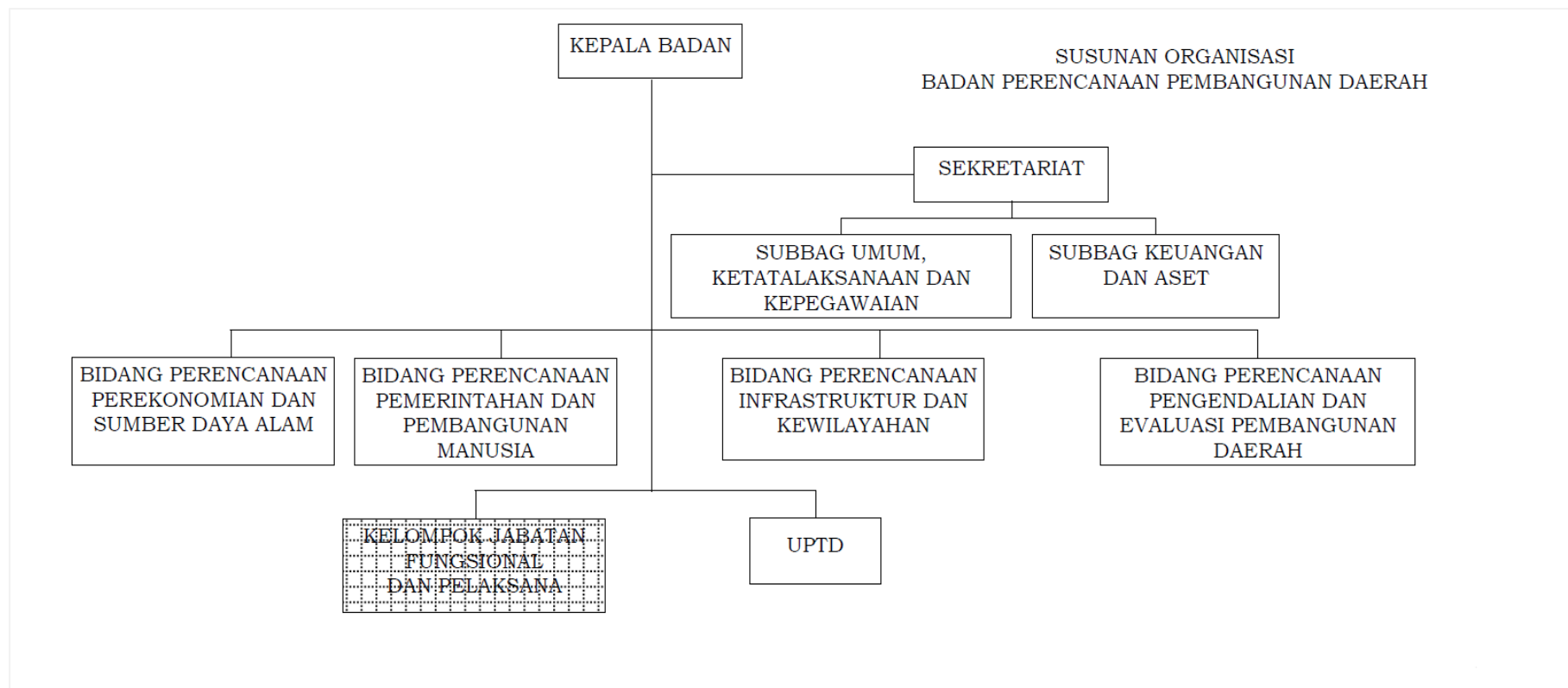
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah;

- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat

- kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bagan gambar struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mutlak diperlukan ketersediaan sumber daya Pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Golongan Ruang

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 136 orang. Adapun jumlah dan komposisi PNS seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

No	Golongan	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	I	1		1	
2	II	18	10	28	
3	III	31	31	62	
4	IV	8	8	16	
5	IX	9	11	20	

No	Golongan	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
6	VII	0	1	1	
6	V	7	1	8	
JUMLAH		74	62	136	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 136 orang yang terdiri dari 74 pria dan 62 wanita. Jumlah pegawai Bappeda yang paling banyak berada pada Golongan III atau Golongan ini merupakan level pegawai dengan pendidikan S-1 atau D-IV ke atas sebanyak 62 orang, yang terdiri dari 31 laki-laki dan 31 pegawai perempuan. Sedangkan Golongan I sebagai golongan terendah dalam struktur golongan PNS dengan pendidikan SD atau SMP sebanyak 1 orang dengan jenis kelamin pria.

2. Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kepangkatan

Jenis-jenis golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dibagi menjadi empat golongan utama, yaitu Golongan I sampai IV, yang mencerminkan jenjang karier, tingkat pendidikan, dan tanggung jawab jabatan. Berikut adalah jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kepangkatan, 2025

No	Pangkat	Gol. Ruang	Pegawai		Jumlah	Ket
			Pria	Wanita		
I	Juru Muda	I/a				
	Juru Muda Tk.I	I/b				
	Juru	I/c				

No	Pangkat	Gol. Ruang	Pegawai		Jumlah	Ket
			Pria	Wanita		
	Juru Tk.I	I/d	1		1	
II	Pengatur Muda	II/a				
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1		1	
	Pengatur	II/c	2		2	
	Pengatur Tk.I	II/d	15	10	25	
III	Penata Muda	III/a	8	4	12	
	Penata Muda Tk.I	III/b	3	4	7	
	Penata	III/c	5	6	11	
	Penata Tk.I	III/d	15	17	32	
IV	Pembina	IV/a	7	7	14	
	Pembina Tk.I	IV/b	1	1	2	
	Pembina Utama Muda	IV/c				
	Pembina Utama Madya	IV/d				
	Pembina Utama	IV/e				
		IX	9	11	20	
		VII		1	1	
		V	7	1	8	
	JUMLAH		74	62	136	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2025

Menurut kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi pangkat Pengatur TK I dan Penata TK I sebanyak 32 orang.

3. Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan tingkat kompetensi, kualifikasi, dan potensi jenjang karir seseorang dalam birokrasi pemerintahan. Dengan kata lain, pendidikan menjadi dasar pengelompokan, pengangkatan, dan promosi jabatan PNS. Pada Tahun 2024 tercatat total Pegawai lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 133 orang yang terdiri dari jumlah ASN sebanyak 113 orang atau sebanyak 87,96 persen, sedangkan non ASN sebanyak 16 orang atau sebanyak 12,04 persen dari total pegawai. Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Tingkat Pendidikan, 2025

No	Pendidikan	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		ASN	Non ASN		
1	S.3	-	-	0	
2	S.2	20	-	20	
3	S.1	79	-	79	
4	D.IV	2	-	2	
5	SM	-	-	0	
6	D.III	1	-	1	
7	D.II	-	-	0	
8	D.I	-	-	0	
9	SLTA	33	-	33	
10	SLTP	-	-	0	
11	SD	1	-	1	
	JUMLAH	136	0	136	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2025

Menurut tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dari total pegawai sebanyak 136 orang sebanyak 20 orang atau 14,70 persen merupakan lulusan magister. Selanjutnya sebanyak 79 orang atau 58,08 persen merupakan Sarjana disusul tingkat SLTA sebanyak 33 orang atau 24,26 persen.

4. Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang Menduduki Jabatan Eselon

Jabatan eselon merupakan tingkatan jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan yang menunjukkan tingkat kedudukan, tanggung jawab, dan wewenang seorang pejabat PNS dalam struktur organisasi pemerintahan. Pada Tahun 2024 tercatat jumlah Pegawai lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon III. Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021, struktur jabatan eselon mulai disederhanakan. Beberapa jabatan eselon III dan IV diubah menjadi jabatan fungsional, dengan tujuan: memangkas birokrasi agar lebih cepat dan efisien, meningkatkan profesionalisme ASN, serta mendorong sistem merit berbasis kompetensi. Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang Menduduki Jabatan Eselon, 2025

No	Eselon	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	I				
2	II				
3	III	4	1	5	

4	IV	1	1	2	
5	V				
	JUMLAH ESSELON	5	2	7	
	JF	9	2	11	
	NON ESSELON	60	58	118	
	TOTAL JUMLAH	74	62	136	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2025

Total Pegawai yang menduduki jabatan eselon adalah 7 orang, terdiri dari 5 pria dan 2 wanita. Pegawai dengan jabatan eselon III berjumlah 5 orang, sementara jabatan eselon IV diisi oleh 2 orang. Selain itu, terdapat 11 pegawai yang menduduki jabatan fungsional, dengan komposisi 9 pria dan 2 wanita. Sebagian besar pegawai, yaitu 118 orang (60 pria dan 58 wanita), berada pada kategori non-eselon.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pekerjaan yang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut, yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Data Aset Kondisi Baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2025

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Aset Tetap	P.C Unit	131	Baik	CV. Ranam Mahakam Persada CV. Annisa CV. Sawi Borneo CV. G2 Eletronic & Computer Pengakajian dan Pembiayaan

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
2	Aset Tetap	Kursi Rapat	130	Baik	Ruang Rapat Lantai II =40, Ruang Rapat Lantai III =40, Ruang Aula Lantai I =20
3	Aset Tetap	Note Book	117	Baik	CV. Harapan Jaya Digital Printing
4	Aset Tetap	Printer (Peralatan Personal Komputer)	113	Baik	Gudang
5	Aset Tetap	Peralatan Fitnes	46	Baik	Treadmill Elektrik - Ruang GYM Gedung Bappeda
6	Aset Tetap	Rak Besi	43	Baik	Rak Besi
7	Aset Tetap	Lap Top	35	Baik	Pengadaan Laptop.Sy.Vanessa Vilna
8	Aset Tetap	Alat Studio Lainnya	33	Baik	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang PODCAST Gedung BAPPEDA
9	Aset Tetap	Peralatan Jaringan lainnya	31	Baik	Belanja Peralatan Jaringan Internet
10	Aset Tetap	Televisi	31	Baik	Belanja Modal 2012
11	Aset Tetap	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	28	Baik	Gudang
12	Aset Tetap	Alat Studio Video Lainnya	27	Baik	1 Set LED Videotron
13	Aset Tetap	Meja Rapat	27	Baik	Belanja Modal Mebel (Belanja Pengadaan Meubelair Ruang Rapat Lantai 2)
14	Aset Tetap	Video Monitor	24	Baik	Belanja Modal Peralatan Studio dan Audio (Ruang Rapat Lantai 2)
15	Aset Tetap	Monitor	21	Baik	Belanja Modal Alat Kegiatan Lainnya
16	Aset Tetap	Sepeda Motor	21	Baik	
17	Aset Tetap	Alat Pengaman / Sinyal	20	Baik	17 Titik (CV Sanca Jaya)
18	Aset Tetap	Scooter	19	Baik	
19	Aset Tetap	Unit Tranceiver VHF Portable	18	Baik	Belanja Modal Pengadaan alat Kantor Lainnya (Pengadaan HANDY TALKY)
20	Aset Tetap	A.C. Window	17	Baik	Standing Floor AC
21	Aset Tetap	A.C. Split	14	Baik	CV. Karsa Perdana
22	Aset Tetap	Sofa	14	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center
23	Aset Tetap	Video Switcher	14	Baik	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
24	Aset Tetap	Kursi Biasa	13	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center
25	Aset Tetap	Microphone/Wireless MIC	12	Baik	Pengadaan Wireless Mic
26	Aset Tetap	Loudspeaker	12	Baik	Termasuk belanja kabel dan jasa instalasi
27	Aset Tetap	Sound System	12	Baik	CV. Aditya Pratama

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
28	Aset Tetap	Mic Conference	12	Baik	Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Pengadaan Sound System Ruang Rapat)
29	Aset Tetap	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	Baik	Belanja Modal 2012
30	Aset Tetap	Personal Computer	12	Baik	Personal Komputer Monitor LG 24 Inc
31	Aset Tetap	Alat Studio Pemetaan lainnya	10	Baik	CV. DWINATA ABADI
32	Aset Tetap	Bracket Standing Peralatan	9	Baik	Termasuk jasa instalasi
33	Aset Tetap	Filing Cabinet Besi	10	Baik	Filling Kabinet
34	Aset Tetap	Lemari Besi/Metal	10	Baik	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
35	Aset Tetap	Microphone Table Stand	10	Baik	Video Wall Ruang Rapat Lantai 3
36	Aset Tetap	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	10	Baik	CV. Tri Jaya
37	Aset Tetap	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	Baik	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
38	Aset Tetap	Alat Penghancur Kertas	8	Baik	Pengadaan Peralatan Gedung.(Pengadaan Penghancur Kertas Besar)
39	Aset Tetap	Kursi Kerja Pejabat lainnya	8	Baik	Aula Lantai 1 =4, Ruang Rapat Lantai III =4
40	Aset Tetap	Kursi Putar	7	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center
41	Aset Tetap	Kursi Tamu	7	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center.(kursi stol kontak)
42	Aset Tetap	Layar Film/Projector	7	Baik	Proyektor (Ruang Rapat Lt.1)
43	Aset Tetap	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	Baik	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran (Tabung Apar)
44	Aset Tetap	Lemari Es	6	Baik	CV. Sarlita
45	Aset Tetap	Meja Komputer	6	Baik	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Data Center
46	Aset Tetap	Meja Panjang	6	Baik	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Data Center
47	Aset Tetap	Tripod Camera	3	Baik	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang PODCAST Gedung BAPPEDA
48	Aset Tetap	Camera Digital	5	Baik	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang PODCAST Gedung BAPPEDA
49	Aset Tetap	Lensa Kamera	5	Baik	CV. Aditya Pratama
50	Aset Tetap	Microphone	5	Baik	Termasuk belanja kabel dan jasa instalasi
51	Aset Tetap	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	Baik	Pengadan Kendaraan Dinas Jabatan Esselon III (Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan)

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
52	Aset Tetap	Power Supply Microphone	5	Baik	CV. Wahana Info Tama
53	Aset Tetap	Alat Pendingin lainnya	4	Baik	AC Cassette 5 PK
54	Aset Tetap	Bracket Holder	4	Baik	Smart TV UHD 4K 75 Inch, Ruang Rapat Lantai 3 dan Ruang GTKI, Include Cabel HDMI
55	Aset Tetap	Generator Set (Lab Scale)	4	Baik	KEg.Survey Investigasi dan Design Industri Terpilih
56	Aset Tetap	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	4	Baik	Ruang Rapat TKPK Bidang SOSBUD
57	Aset Tetap	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	4	Baik	Belanja Modal Mebel (belanja Pengadaan Meubelair Ruang Rapat Lantai 2)
58	Aset Tetap	Laci Box	4	Baik	Ruang Rapat TKPK Bidang SOSBUD
59	Aset Tetap	Meja Resepsionis	4	Baik	CV. Karya Insan Prima
60	Aset Tetap	Meja Tamu Biasa	4	Baik	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Data Center
61	Aset Tetap	Mesin Absensi	4	Baik	CV. Ranam Mahakam Persada
62	Aset Tetap	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	4	Baik	Belanja Modal Alat Pendingin (Pengadaan AC Standing 5 PK)
63	Aset Tetap	Tiang Bendera	4	Baik	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
64	Aset Tetap	Board Display	3	Baik	Belanja Modal Alat Kegiatan Lainnya
65	Aset Tetap	Dispenser	3	Baik	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
66	Aset Tetap	Elevator /Lift	3	Baik	CV. Subur Lestari Abadi
67	Aset Tetap	Gordyin/Kray	3	Baik	Pengadaan Meubelair (Beli Gordyn)
68	Aset Tetap	Hard Disk	3	Baik	Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Harddisk Eksternal)(Pemegang,Ratna Agustina,Benny Novianto,Dedy Iswanto,Ferdiannur,Tofik)
69	Aset Tetap	Kursi Besi/Metal	3	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center
70	Aset Tetap	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	Baik	Meja Kerja
71	Aset Tetap	Peralatan Minikomputer lainnya	3	Baik	Printer Epson (Sy.Vanesa Vilna.SIS.,SE.,MM.)
72	Aset Tetap	Station Wagon	3	Baik	Kepala Bappeda
73	Aset Tetap	Video Conference	3	Baik	Video Conference Logitech Group (Include Kelengkapan)

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
74	Aset Tetap	Video Processor	3	Baik	Belanja Modal Video Processor
75	Aset Tetap	Audio Amplifier	2	Baik	Video Wall Ruang Rapat Lantai 3
76	Aset Tetap	Audio Mixing Console	2	Baik	Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Pengadaan Sound System Ruang Rapat)
77	Aset Tetap	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2	Baik	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang PODCAST Gedung BAPPEDA
78	Aset Tetap	Coffee Maker	2	Baik	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
79	Aset Tetap	Jemuran	2	Baik	Rumah Dinas Jabatan Jalan Pahlawan Bukit Biru
80	Aset Tetap	Karpet	2	Baik	Ruang Podcast Kantor Bappeda
81	Aset Tetap	Komputer Jaringan lainnya	2	Baik	Pengadaan Personal Komputer (di Ruang Kepala Sub Bid Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Daerah) No Kontrak : 020.1/62/SET-BAPP/2019 Tgl,17 Oktober 2019
82	Aset Tetap	Lemari Kayu	2	Baik	Rumah Dinas Jabatan Bappeda
83	Aset Tetap	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Baik	Ruang Rapat TKPK Bidang SOSBUD
84	Aset Tetap	Meja Makan Kayu	2	Baik	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Data Center
85	Aset Tetap	Meja Operator	2	Baik	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Data Center
86	Aset Tetap	Meja Tambahan	2	Baik	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Data Center
87	Aset Tetap	Mesin Fotocopy Lainnya	2	Baik	CV. Kumala Prima Mandiri
88	Aset Tetap	Mixer	2	Baik	Termasuk belanja kabel dan jasa instalasi
89	Aset Tetap	Papan Nama Instansi	2	Baik	CV. Citra Sejati
90	Aset Tetap	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	2	Baik	Meja Tennis Meja
91	Aset Tetap	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2	Baik	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
92	Aset Tetap	Power Amplifier	2	Baik	Termasuk belanja kabel dan jasa instalasi
93	Aset Tetap	Server	2	Baik	Evalian
94	Aset Tetap	Tas Kamera	2	Baik	Shoulder Bag - Ruang Umum Sekretariat
95	Aset Tetap	Transmitter Reciever	2	Baik	Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Pengadaan Sound System Ruang Rapat)
96	Aset Tetap	alat bantu eksplorasi lainnya lainnya (dst)	2	Baik	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Lainnya

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
97	Aset Tetap	peralatan mainframe lainnya (dst)	2	Baik	Belanja Modal Alat Kegiatan Lainnya
98	Aset Tetap	Alat Hiasan	2	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center (VANVAS ART PAINTING)
99	Aset Tetap	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	Baik	Transmitter/Receiver (Video Wall Ruang Rapat Lantai 3)
100	Aset Tetap	Alat Kantor Lainnya	1	Baik	(3 Paket)
101	Aset Tetap	Battery Charge	1	Baik	Video Wall Ruang Rapat Lantai 3
102	Aset Tetap	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik	Perangkat CCTV
103	Aset Tetap	Camera Conference	1	Baik	Video Wall Ruang Rapat Lantai 3
104	Aset Tetap	Camera Film	1	Baik	CV. Ranam Mahakam Persada
105	Aset Tetap	Compressor Unit	1	Baik	CV. Subur Lestari Abadi
106	Aset Tetap	Control Prosesing Unit	1	Baik	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
107	Aset Tetap	Display	1	Baik	Belanja Modal Peralatan PC Studio dan Film, Komputer Lainnya, Alat Kantor Lainnya
108	Aset Tetap	Equalizer	1	Baik	Video Wall Ruang Rapat Lantai 3
109	Aset Tetap	Genset	1	Baik	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik (Pengadaan Genset)
110	Aset Tetap	Hub	1	Baik	16-Port Gigabit (Video Wall Ruang Rapat Lantai 3)
111	Aset Tetap	Lemari Kaca	1	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center
112	Aset Tetap	Meja Bayi	1	Baik	Ruang Laktasi Kantor Bappeda
113	Aset Tetap	Meja Kerja Kayu	1	Baik	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Data Center
114	Aset Tetap	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik	Belanja Moda Mebel (belanja Pengadaan Meubelair Ruang Rapat Lantai 2)
115	Aset Tetap	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik	CV. Wahana Infotama
116	Aset Tetap	Mimbar/Podium	1	Baik	CV. Esa Media Promo
117	Aset Tetap	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	Baik	Kepala BAPPEDA
118	Aset Tetap	Papan Planel	1	Baik	
119	Aset Tetap	Papan Tulis	1	Baik	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Data Center
120	Aset Tetap	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik	Pengadaan Papan Billboard Jl. AP. Mangkunegoro Samping Kantor BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
121	Aset Tetap	Rak Kayu	1	Baik	Ruang Podcast Kantor Bappeda
122	Aset Tetap	Rak Peralatan	1	Baik	Rack 20U Glass Door (Video Wall Ruang Rapat Lantai 3)
123	Aset Tetap	Rak Piring Alumunium	1	Baik	Rumah Dinas Jabatan Bappeda
124	Aset Tetap	Scanner (Universal Tester)	1	Baik	Termasuk Honor Pemeriksa Barang 3.701.000
125	Aset Tetap	Tablet PC	1	Baik	Belanja Modal Personal Komputer
126	Aset Tetap	Tempat Tidur Kayu	1	Baik	Rumah Dinas Jabatan Bappeda
127	Aset Tetap	Wireless	1	Baik	Media Sharing (Video Wall Ruang Rapat Lantai 3)
128	Aset Tetap	Wireless Access Point	1	Baik	Video Wall Ruang Rapat Lantai 3
129	Aset Tetap	Wireless Data Tranmission System	1	Baik	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang PODCAST Gedung BAPPEDA
130	Aset Tetap	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	1	Baik	Drone - Ruang Umum Sekretariat
131	Aset Tetap	alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	Baik	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
132	Aset Tetap	humidity control lainnya (dst)	1	Baik	Belanja Modal Alat Kegiatan Lainnya
133	Ekstrakom	Sound System	40	Baik	Pengadaan Peralatan Gedung
134	Ekstrakom	P.C Unit	15	Baik	Pengadaan Personal Komputer
135	Ekstrakom	Alat Hiasan	13	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center (Hiasan Tulisan Motivasi dan Beck)
136	Ekstrakom	Bantal Angin/Wind Ring	12	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center (bantal sofa)
137	Ekstrakom	Microphone/Wireless MIC	9	Baik	Pengadaan Peralatan Gedung
138	Ekstrakom	Lampu	6	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center
139	Ekstrakom	Alat Studio Lainnya	5	Baik	Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Pengadaan Sound System Ruang Rapat)
140	Ekstrakom	Tripod Camera	3	Baik	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang PODCAST Gedung BAPPEDA
141	Ekstrakom	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Baik	Tabung Apar
142	Ekstrakom	Pot Bunga	2	Baik	Pengadaan Moubel Ruang Data Center
143	Ekstrakom	Bracket Standing Peralatan	1	Baik	Belanja Modal Alat Kegiatan Lainnya
144	Ekstrakom	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	1	Baik	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (Ruang Record Centre)
TOTAL KESELURUHAN			1487		

**Tabel 2.6 Data Aset Kondisi Rusak Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2025**

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Aset Lainnya	A.C. Split	18	Rusak Berat	Barang Dalam Penelusuran
2	Aset Lainnya	A.C. Window	3	Rusak Berat	TL Inventarisasi 2012/2013
3	Aset Lainnya	Alat Dapur lainnya	2	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang (Belanja modal TAHUN 2007)
4	Aset Lainnya	Alat Kantor Lainnya	68	Rusak Berat	POT+TANAMAN BESAR LOBBY LT.1 B (BAPPEDA)PT.PRIMA ADIYASA
5	Aset Lainnya	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	Rusak Berat	Hibah Dari BPBD
6	Aset Lainnya	Alat Pembersih lainnya	26	Rusak Berat	Gudang
7	Aset Lainnya	Alat Penghancur Kertas	14	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas (Belanja modal tahun 2007)
8	Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	Rusak Berat	CV. Riona Makka Lestari
9	Aset Lainnya	Alat Studio Video Lainnya	19	Rusak Berat	MIXER 18 CHANNEL YAMAHA MG 186 CX (BAPPEDA)
10	Aset Lainnya	Antene SHF Transportable	1	Rusak Berat	Antene SHF Transportable
11	Aset Lainnya	Audio Logging Recorder	7	Rusak Berat	CV. Wahana Info Tama
12	Aset Lainnya	Brandkas	11	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan brankas (Belanja modal tahun 2007)
13	Aset Lainnya	Buffet Kaca	1	Rusak Berat	Lemari Arsip
14	Aset Lainnya	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan CPU (Belanja modal tahun 2007)
15	Aset Lainnya	Camera Electronic	63	Rusak Berat	Hj.Vanessa Vilna,SIS
16	Aset Lainnya	Camera Video	2	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan kamera (Belanja Modal 2008)
17	Aset Lainnya	Camera film	2	Rusak Berat	
18	Aset Lainnya	Digital Audio Taperecorder	1	Rusak Berat	Keg.Penyediaan Peralatan dan Perekengkapan Kantor (Drs.H.Alexander Siswanto,MT)
19	Aset Lainnya	Dispenser	10	Rusak Berat	CV. RAFA BARQAH
20	Aset Lainnya	External	14	Rusak Berat	HJ.ANI,AR (HDD Eksternal)
21	Aset Lainnya	Facsimile	2	Rusak Berat	Drs. H. Alexander Siswanto, MT
22	Aset Lainnya	Filing Cabinet Besi	10	Rusak Berat	CV. ZAHRA
23	Aset Lainnya	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Rusak Berat	fhoto presiden dan wakil presiden.PT.PRIMA ADIYASA NO.KONTRAK03/027/ADD/SP/SPPK/SETKAB/XII/2009.

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
24	Aset Lainnya	Generator Set (Lab Scale)	2	Rusak Berat	
25	Aset Lainnya	Global Positioning System	3	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan alat GPS (Belanja modal TAHUN 2007)
26	Aset Lainnya	Handy Cam	24	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan handycam (Belanja Modal 2008)
27	Aset Lainnya	Hard Disk	10	Rusak Berat	Sistem Informasi E-Book
28	Aset Lainnya	Hub	1	Rusak Berat	Sistem Informasi E-Book
29	Aset Lainnya	Jam Elektronik	21	Rusak Berat	CV. Dinar Utama
30	Aset Lainnya	Kipas Angin	6	Rusak Berat	CV. Putri Mahakam Mandiri
31	Aset Lainnya	Kompas Geologi	2	Rusak Berat	
32	Aset Lainnya	Kursi Besi/Metal	2	Rusak Berat	Barang Dalam Penelusuran
33	Aset Lainnya	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Rusak Berat	Barang Dalam Penelusuran
34	Aset Lainnya	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	94	Rusak Berat	kursi hadap metting
35	Aset Lainnya	Kursi Kayu	55	Rusak Berat	KURSI MAKAN SEBANYAK 61 BUAH x Rp.495.000 = 30.195.000
36	Aset Lainnya	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	507	Rusak Berat	kursi kerja staf type 1
37	Aset Lainnya	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Rusak Berat	kursi kerja kepala bappeda
38	Aset Lainnya	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Rusak Berat	kursi kerja sekretaris bappeda
39	Aset Lainnya	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	Rusak Berat	kursi kerja kasubid type 1
40	Aset Lainnya	Kursi Kerja Pejabat lainnya	9	Rusak Berat	kursi kerja
41	Aset Lainnya	Kursi Lipat	200	Rusak Berat	Barang dalam penelusuran
42	Aset Lainnya	Kursi Rapat	81	Rusak Berat	KURSI MEETING SEBANYAK 216 BUAH x Rp.1.045.000 = Rp. 225.720.000
43	Aset Lainnya	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	4	Rusak Berat	Barang Dalam penelusuran
44	Aset Lainnya	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	5	Rusak Berat	CV. Setya Persada
45	Aset Lainnya	Lambang Garuda Pancasila	11	Rusak Berat	GARUDA RUANG ESSELON II DAN III (BAPPEDA)
46	Aset Lainnya	Layar	4	Rusak Berat	CV. Fajar Utama
47	Aset Lainnya	Layar Film/Projector	41	Rusak Berat	projektor infocus IN2106 WXGA (BAPPEDA)
48	Aset Lainnya	Lemari Besi/Metal	43	Rusak Berat	rak type 3 metal finis cat bakar / powder coating

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
49	Aset Lainnya	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	20	Rusak Berat	lemari file metal fhnis cat powder coating, partical board lapis HPL kaca bening 6 mm, hardware
50	Aset Lainnya	Lemari Es	3	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan kulkas (Belanja modal TAHUN 2007)
51	Aset Lainnya	Lemari Kayu	112	Rusak Berat	lemari file
52	Aset Lainnya	Lemari Penyimpan	1	Rusak Berat	
53	Aset Lainnya	Meja 1/2 Biro	16	Rusak Berat	Meja baca metal finih crome, partical board finish HPL edging HPL finish maple, kaca 6 mm sandblast
54	Aset Lainnya	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	322	Rusak Berat	meja staf
55	Aset Lainnya	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Rusak Berat	
56	Aset Lainnya	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18	Rusak Berat	MEJA KASUBAG UK.200*90*75CM,90*60*65CM
57	Aset Lainnya	Meja Kerja Pejabat lain-lain	11	Rusak Berat	Meja Kerja Uk.340*120*75cm,100*60*75cm
58	Aset Lainnya	Meja Komputer	7	Rusak Berat	
59	Aset Lainnya	Meja Makan Besi	5	Rusak Berat	MEJA MAKAN SEBANYAK 14 BUAH x Rp.2.530.000 = 35.420.000
60	Aset Lainnya	Meja Maket/Peta	1	Rusak Berat	
61	Aset Lainnya	Meja Panjang	2	Rusak Berat	
62	Aset Lainnya	Meja Rapat	42	Rusak Berat	MEJA METTING SEBANYAK 216 BUAH x Rp.1.466.520 = 316.768.320
63	Aset Lainnya	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2	Rusak Berat	
64	Aset Lainnya	Meja Tambahan	39	Rusak Berat	meja sudut
65	Aset Lainnya	Mesin Fotocopy Folio	1	Rusak Berat	Mesin Foto Copy
66	Aset Lainnya	Mesin Fotocopy Lainnya	1	Rusak Berat	Gudang
67	Aset Lainnya	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Rusak Berat	H.Asmaran,SE
68	Aset Lainnya	Mesin Jilid	1	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan mesin jilid (Belanja modal tahun 2007)
69	Aset Lainnya	Mesin Ketik Listrik	1	Rusak Berat	Dra.HJ.Isnaini Trikorawaty,MT
70	Aset Lainnya	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	2	Rusak Berat	Herry Bachrin,SE
71	Aset Lainnya	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	Rusak Berat	Rohardi Raharjo,SE
72	Aset Lainnya	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	6	Rusak Berat	Barang Dalam Penelusuran

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
73	Aset Lainnya	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Rusak Berat	Vacuum Cleaner (Drs.H.Alexander Siswanto,MT)
74	Aset Lainnya	Mesin Penghitung Uang	2	Rusak Berat	
75	Aset Lainnya	Microphone/Wireless MIC	4	Rusak Berat	WIRELESS MICROPHONE SHURE UHF (RECEIVER + 2 MICROPHONE.
76	Aset Lainnya	Monitor	14	Rusak Berat	CV. Sinar Mutiara Koetai
77	Aset Lainnya	Note Book	81	Rusak Berat	Margo Birawan
78	Aset Lainnya	Overhead Projector	2	Rusak Berat	TL Inventarisasi 2012/2013
79	Aset Lainnya	P.C Unit	100	Rusak Berat	KOMPUTER DESKTOP SONY VAIO (BAPPEDA)
80	Aset Lainnya	Papan Visual/Papan Nama	1	Rusak Berat	
81	Aset Lainnya	Partisi	2	Rusak Berat	Partisi Pot Bunga (7 Unit)
82	Aset Lainnya	Peralatan Jaringan lainnya	19	Rusak Berat	instalansi stop kontrak & saklar (BAPPEDA)
83	Aset Lainnya	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	8	Rusak Berat	Bet Tennis Meja
84	Aset Lainnya	Peralatan Personal Komputer lainnya	40	Rusak Berat	Keg.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Drs.H.Alexander Siswanto,MT)
85	Aset Lainnya	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	8	Rusak Berat	Belanja Modal 2011
86	Aset Lainnya	Printer (Peralatan Personal Komputer)	129	Rusak Berat	Gudang
87	Aset Lainnya	Professional Sound System	2	Rusak Berat	
88	Aset Lainnya	Rak Besi	18	Rusak Berat	Rak Server
89	Aset Lainnya	Rak Kayu	3	Rusak Berat	rak type 1
90	Aset Lainnya	Rice Warmer	1	Rusak Berat	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Lainnya (Belanja Modal 2008)
91	Aset Lainnya	Scanner (Universal Tester)	1	Rusak Berat	Keg.Pengembangan ICT
92	Aset Lainnya	Sofa	48	Rusak Berat	sofa 3 seat
93	Aset Lainnya	Sum-Invert Amplifier	1	Rusak Berat	Inverter (Drs.H.Alexander Siswanto,MT)
94	Aset Lainnya	Telephone (PABX)	1	Rusak Berat	Barang Dalam Penelusuran
95	Aset Lainnya	Televisi	5	Rusak Berat	Keg.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
96	Aset Lainnya	Tustel	10	Rusak Berat	Keg.Pengembangan ICT
97	Aset Lainnya	Uninterruptible Power Supply (UPS)	32	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer (Belanja Modal 2008)
98	Aset Lainnya	Unit Power Supply	1	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer (Belanja modal tahun 2007)

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
99	Aset Lainnya	Video Monitor	1	Rusak Berat	Kamera CCTV
100	Aset Lainnya	White Board	8	Rusak Berat	white board
101	Aset Lainnya	Wireless	2	Rusak Berat	Keg.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
102	Aset Lainnya	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	1	Rusak Berat	Belanja modal Pengadaan mesin hitung (Belanja modal tahun 2007)
103	Aset Lainnya	peralatan studio audio lainnya (dst)	12	Rusak Berat	Keg.Pendampingan Pameran Luar Daerah
104	Ekstrakom	Alat Dapur lainnya	400	Rusak Berat	Piring
105	Ekstrakom	Alat Kantor Lainnya	54	Rusak Berat	cerminPT.PRIMA ADIYASA
106	Ekstrakom	Alat Pembersih lainnya	10	Rusak Berat	Tempat Sampah + Asbak
107	Ekstrakom	Alat Rumah Tangga Lain-lain	64	Rusak Berat	CV. Riona Makka Lestari
108	Ekstrakom	Gambar Presiden/Wakil Presiden	10	Rusak Berat	FHOTO PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (BAPPEDA)
109	Ekstrakom	Hard Disk	5	Rusak Berat	Keg.Pengembangan ICT
110	Ekstrakom	Jam Elektronik	10	Rusak Berat	Jam Dinding
111	Ekstrakom	Kipas Angin	6	Rusak Berat	TL Inventarisasi 2012/2013
112	Ekstrakom	Kursi Putar	61	Rusak Berat	TL Inventarisasi 2012/2013
113	Ekstrakom	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	5	Rusak Berat	
114	Ekstrakom	Meubeleur lainnya	1	Rusak Berat	Belanja Modal Meja Kursi Belanja Modal
115	Ekstrakom	Papan Tulis	1	Rusak Berat	Barang Dalam Penelusuran
116	Ekstrakom	Peralatan Jaringan lainnya	1	Rusak Berat	pemasangan saklar single ex. clipsal (BAPPEDA) sebanyak 4 buah x @Rp. 99.000 jumlah Rp. 396.000
117	Ekstrakom	Peralatan Personal Komputer lainnya	28	Rusak Berat	Keg.Pengembangan ICT
118	Ekstrakom	Pot Besar	30	Rusak Berat	Setiap Lantai Bangunan
119	Ekstrakom	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Rusak Berat	Gudang
120	Ekstrakom	Rice Cooker (Alat Dapur)	406	Rusak Berat	Tempat Kue
121	Ekstrakom	Rice Warmer	440	Rusak Berat	Piring Kaca
122	Ekstrakom	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Rusak Berat	Keg.Pengembangan ICT
123	Ekstrakom	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	Rusak Berat	VGA Splitter
Total Keseluruhan			4168		

Aset yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan kondisi baik, terpelihara dan berfungsi sesuai peruntukannya. Ketersediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai dan dalam kondisi baik merupakan faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Pengelolaan dan pemeliharaan aset dilakukan secara tertib dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesiapan yang memadai untuk mendukung kegiatan perangkat daerah. Selain kondisi baik sarana dan prasarana operasional yang dimiliki Bappeda sebagian dalam kondisi rusak berat dengan tidak berfungsinya peralatan yang ditandai dengan kerusakan struktural, penurunan fungsi utama, serta biaya perbaikan yang tidak ekonomis dibandingkan dengan pengadaan baru sehingga tidak dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gambaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tertuang pada tabel dibawah ini. Tabel ini memuat informasi mengenai target indikator kinerja, capaian realisasi, dan rasio ketercapaiannya yang mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Data di bawah ini merupakan data-data indikator yang dilaksanakan di Renstra sebelumnya. Dapat dilihat terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai di tahun 2024. Nilai Sakip Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2024 tidak tercapai dengan nilai capaian 87,95 persen,

hal ini umumnya disebabkan oleh kombinasi kelemahan pada perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Indikator kinerja lainnya yaitu persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah serta persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD di tahun 2024, persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD, persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD juga tidak tercapai 100 persen.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	75	85	87	90	93	116,84	95,96	97,01	0	0	155,79	112,89	111,51	0	0
2	Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,2	2,3	2,4	2,5	2,60	2,07	2,8	3,37	0	0	94,09	121,74	140,42	0	0
3	Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	94	95	96	96,50	97	94,20	96,09	97,34	0	0	100,21	101,15	101,40	0	0
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	87	88	88,5	88,85	90	91,20	72,78	77,84	0	0	104,83	82,70	87,95	0	0
5	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	100	100	100	100	93,29	100	97,52	0	0	93,29	100,00	97,52	0	0
6	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	100	100	100	100	94,96	96,24	94,55	0	0	94,96	96,24	94,55	0	0

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
7	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	100	100	100	100	90,02	87,75	93,65	0	0	90,02	87,75	93,65	0	0
8	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	100	100	100	100	99,05	95,63	92,98	0	0	99,05	95,63	92,98	0	0
9	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	12	12	13	12	12	12	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
10	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
11	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada PD	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
12	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
13	Jumlah Pakaian	147	0	0	145	0	139	3	3	0	0	94,56	0,00	0,00	0	0
14	Jumlah ASN	60	60	60	60	60	30	60	60	0	0	50,00	100,00	100,00	0	0
15	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
17	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
18	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
19	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	24	24	24	24	27	24	24	24	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
20	Jumlah Pendampingan perencanaan	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
21	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
22	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
23	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
24	Jumlah dokumen analisis data dan Informasi	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
25	Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
26	Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	1	1	6	9	12	1	7	6	0	0	100,00	700,00	100,00	0	0

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
27	Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0
28	Jumlah Personil Pembinaan Data	30	30	30	30	30	32	58	30	0	0	106,67	193,33	100,00	0	0
29	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12	13	13	13	13	12	13	13	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0
30	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75	75	75	75	75	75	79	75	0	0	100,00	105,33	100,00	0	0
31	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	37	37	37	37	37	37	38	36	0	0	100,00	102,70	97,30	0	0

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	(Sumber Daya Alam)															
32	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70	70	70	70	70	70	71	70	0	0	100,00	101,43	100,00	0	0

Sumber : Data yang diolah, 2025

**Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai
Kartanegara**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.162.400.000,00	4.212.400.000,00	4.212.400.000,00	4.212.400.000,00	4.212.400.000,00	4.817.400.000,00	5.503.713.582,00	5.481.781.456,00	0	0	115,74	130,66	130,13	0	0	23,91	2,62
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.996.749.440,00	3.109.249.440,00	3.109.249.440,00	3.109.249.440,00	3.109.249.440,00	3.820.249.440,00	4.562.065.600,00	4.540.589.988,00	0	0	127,48	146,73	146,03	0	0	73,98	3,52
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	24.999.174.778,00	25.252.620.453,00	25.225.196.453,00	25.604.157.693,00	25.275.196.453,00	25.980.459.212,00	33.858.125.539,00	27.531.973.899,00	0	0	103,93	134,08	109,14	0	0	21,99	1,17

Sumber : Data yang diolah, 2025

Evaluasi atas capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mengalami fluktuasi kinerja, dengan beberapa indikator menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan sebagian lainnya belum memiliki data capaian pada tahun-tahun tertentu, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tahun selanjutnya.

A. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Indikator Rata-rata Capaian Indikator Tujuan Daerah menunjukkan kinerja yang melampaui target. Pada tahun 2022 hingga 2024, rasio capaian indikator ini secara berturut-turut mencapai 155,79 persen, 112,89 persen, dan 111,51 persen. Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan bahwa pencapaian atas tujuan-tujuan strategis daerah berlangsung dengan sangat baik dalam periode tersebut, mengindikasikan efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan Pembangunan.

Indikator Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah juga menunjukkan capaian yang tinggi, khususnya pada tahun 2023 dengan skor realisasi mencapai 2,8 terhadap target 2,3, menghasilkan rasio capaian sebesar 121,74 persen. Meskipun pada tahun 2022 rasio capaian sedikit menurun menjadi 94,09 persen, tren capaian yang melebihi target pada tahun berikutnya mencerminkan peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah serta apresiasi eksternal atas praktik perencanaan yang inovatif dan partisipatif.

Indikator Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Daerah menunjukkan konsistensi kinerja yang positif. Rasio capaian dari tahun 2022 hingga 2024 berada pada kisaran 100,21 persen hingga 101,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah cukup efektif dalam mendorong pencapaian sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

B. Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian indikator Nilai SAKIP PD dalam kurun waktu 2022 s.d 2024 berfluktuasi, dimana pada tahun 2022 capaian sebesar 91,20 dan kemudian menurun ditahun 2023 menjadi 72,78 dan kembali meningkat menjadi 77,84 ditahun 2024, namun kondisi fluktuatif yang terjadi , khususnya di tahun 2023 bukan berarti capaian terkait dengan akuntabilitas perangkat daerah menurun, namun terjadinya penurunan capaian di karenakan terjadi perubahan dalam penilaian AKIP berdasarkan dari Kemenpan RB, mengingat secara umum Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja PD yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan kinerja yang dicapai.

Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan pada Sasaran Daerah menunjukkan kondisi fluktuatif. Kondisi fluktuatif ini menggambarkan bahwa program prioritas merupakan program yg langsung mendukung sasaran daerah, namun ada beberapa kondisi yg menyebabkan capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari capaian 2023 antara lain :

1. Adanya penyesuaian alokasi anggaran, sebagai tindak lanjut respons terhadap mandatory pemerintah pusat dan provinsi, sehingga dapat mengubah target dan capaian program prioritas.
2. Adanya kebijakan percepatan pencapaian target yg semulanya di capai pd tahun 2026 ditarik maju ke 2024, sehingga target yg ditetapkan menjadi tinggi.

Capaian Indikator Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan pada renja-PD juga menunjukkan kondisi fluktuatif. Kondisi fluktuatif ini menggambarkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi kebijakan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Fluktuasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Perbedaan tingkat prioritas kebijakan tiap tahun dimana Fokus dan arah kebijakan pemerintah daerah dapat berubah

mengikuti isu strategis dan arah Pembangunan tahunan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan rekomendasi pada bidang sosial budaya dan pemerintahan tidak selalu menjadi prioritas utama setiap tahun. Kompleksitas permasalahan sosial dan pemerintahan bidang Sosbud Pem juga seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, politik dan partisipasi masyarakat. Selain itu tingkat monitoring dan evaluasi yang belum maksimal cukup mempengaruhi capaian indikator ini. Proses monev tidak dilakukan secara rutin atau terukur, maka tindak lanjut terhadap rekomendasi kebijakan menjadi tidak optimal.

Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD selama kurun waktu 2022-2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan efektivitas peran perencanaan kebijakan bidang ekonomi dan sumber daya alam. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 94,55%, yang perlu mendapat perhatian untuk memastikan efektivitas pelaksanaan rekomendasi kebijakan tetap terjaga. secara umum terdapat peningkatan dari 94,96% (2022) menjadi 96,24% (2023) yang mengindikasikan perbaikan koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi kebijakan. capaian ini dipengaruhi faktor-faktor pendukung seperti meningkatnya Koordinasi lintas perangkat daerah yang baik dalam menindaklanjuti hasil kajian dan rekomendasi kebijakan. Dukungan data dan informasi ekonomi-SDA yang semakin kuat. serta Komitmen pimpinan dalam memastikan rekomendasi terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (Renja, Renstra, RKPD).

Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana pada Renja-PD selama kurun waktu 2022-2024 Tren capaian Kinerja menunjukkan tren menurun selama tiga tahun terakhir. Dari 99,05% (2022) turun menjadi 95,63% (2023) dan kembali menurun ke 92,98% (2024). Secara akumulatif terjadi penurunan sekitar 6,07 poin dalam tiga tahun mengindikasikan adanya tantangan dalam

penerapan rekomendasi kebijakan di bidang sarana prasarana. Penurunan tren ini mencerminkan adanya kendala implementasi baik dari sisi teknis, anggaran, maupun koordinasi antar perangkat daerah pelaksana kebijakan. diperlukan Penguatan koordinasi lintas sektor, prioritas anggaran, dan mekanisme monitoring pelaksanaan rekomendasi menjadi langkah kunci untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan ke depan.

C. Capaian Indikator Kegiatan

Secara umum, capaian kinerja kegiatan selama periode 2022–2024 menunjukkan kinerja tinggi dan stabil, di mana sebagian besar indikator berada di atas 90%. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang menurun atau stagnan, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan sinergi lintas bidang. Untuk capaian kegiatan yang berkaitan dengan kinerja Administrasi / Urusan penunjang yaitu capaian Jumlah Laporan Keuangan, Dokumen Barang Milik Daerah dan Persentase Pengadaan serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah mencapai 100% setiap tahun, menunjukkan pengelolaan administrasi internal berjalan efisien dan patuh terhadap aturan pengelolaan aset daerah. Secara umum, bidang administrasi telah berkontribusi pada peningkatan tertib dokumen dan pelaporan, yang menjadi dasar akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

untuk Kegiatan yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan merupakan Indikator ini mencerminkan fungsi inti Bappeda dalam koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, forum konsultasi publik, Musrenbang, pendampingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan Pembangunan. Kegiatan ini merupakan jembatan antara perencanaan teknokratik dan aspiratif, sekaligus memastikan sinkronisasi antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan Renja PD).

Capaian terkait dengan kelompok indikator perencanaan dan pengendalian Pembangunan ini seperti Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang

menunjukkan capaian 100% dan konsisten, menandakan proses perencanaan tahunan berjalan tepat waktu dan partisipatif.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terlihat fluktuatif yang dapat dilihat dari capaian 79 menjadi 75, namun hal bukan berarti menunjukkan kinerja yang menurun namun disebabkan penyesuaian jadwal penyusunan atau rasionalisasi program seiring perubahan arah kebijakan daerah. Untuk indikator Pendampingan perencanaan tetap tinggi, menegaskan peran aktif Bappeda dalam asistensi teknis kepada perangkat daerah lain.

Pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan yang merupakan Indikator yang menekankan pentingnya penyediaan dan pembinaan data Pembangunan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Hasil evaluasi pada dengan indikator Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan menurun dari 7 menjadi 6, menunjukkan kebutuhan standarisasi layanan informasi di tingkat kecamatan. Jumlah Personil Pembinaan Data menurun cukup signifikan dari 58 menjadi 30, kemungkinan karena rotasi pegawai atau belum optimalnya pelatihan data statistik sektoral. Jumlah Rancangan Regulasi Daerah yang belum terealisasi menggambarkan kendala proses harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga hukum.

Secara keseluruhan, capaian kinerja indikator pada periode 2022–2024 menunjukkan adanya komitmen dan kapasitas kelembagaan yang kuat dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah. Namun demikian, ketidaktersediaan data pada beberapa indikator menandakan perlunya peningkatan sistem pemantauan dan pelaporan kinerja yang lebih terintegrasi dan tepat waktu, guna memastikan bahwa seluruh indikator strategis dapat dievaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja anggaran dan realisasi pelaksanaan program pada kurun waktu tahun 2022 hingga 2024, diketahui bahwa terdapat variasi capaian yang mencerminkan perbedaan tingkat prioritas, efektivitas pelaksanaan, serta efisiensi pengelolaan anggaran pada masing-masing program.

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 23,91 persen dan pertumbuhan realisasi sebesar 2,62 persen hal ini disebabkan pada rata-rata pertumbuhan realisasi bahwa realisasi dihitung dari tahun 2022 sampai 2024, untuk tahun 2025 masih berjalan sedang 2026 belum dilaksanakan sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran tersedianya dari tahun 2022 sampai 2026. Rasio antara realisasi dan anggaran meningkat secara konsisten dari 115,74 persen pada tahun 2022 menjadi 130,13 persen pada tahun 2024.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 73,98 persen dan pertumbuhan realisasi sebesar 5,93 persen. hal ini disebabkan pada rata-rata pertumbuhan realisasi bahwa realisasi dihitung dari tahun 2022 sampai 2024, untuk tahun 2025 masih berjalan sedang 2026 belum dilaksanakan sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran tersedianya dari tahun 2022 sampai 2026. Rasio antara realisasi dan anggaran meningkat secara konsisten dari 127,48 persen pada tahun 2022 menjadi 146,03 persen pada tahun 2024.

Program Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola siklus perencanaan dan evaluasi Pembangunan. Kinerja positif ini juga menandakan peningkatan komitmen terhadap perencanaan berbasis kinerja yang terukur.

Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar

21,99 persen dan realisasi sebesar 1,95 persen, hal ini disebabkan pada rata-rata pertumbuhan realisasi bahwa realisasi dihitung dari tahun 2022 sampai 2024, untuk tahun 2025 masih berjalan sedang 2026 belum dilaksanakan sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran tersedianya dari tahun 2022 sampai 2026. Rasio antara realisasi terhadap anggaran meningkat secara konsisten yakni dari 103,93 persen pada tahun 2022 menjadi 109,14 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program penunjang, terutama dalam menjamin kelancaran fungsi-fungsi administratif dan operasional kelembagaan pemerintahan daerah. Stabilitas ini perlu dipertahankan untuk menjamin kontinuitas dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Secara umum, evaluasi atas ketiga program menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besaran alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sejalan dengan fungsi utama Bappeda sebagai unsur perencana yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan Pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai leading sector dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah, Bappeda memberikan layanan teknis dan substantif kepada OPD dalam bentuk fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD), asistensi perumusan program dan kegiatan prioritas, penyediaan data dan informasi Pembangunan, serta penguatan kapasitas perencanaan berbasis evidence dan kinerja. Intervensi Bappeda difokuskan

pada upaya untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan lintas sektor, efektivitas pencapaian sasaran Pembangunan, serta konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Dengan menjadikan seluruh OPD sebagai kelompok sasaran utama layanan, Bappeda berperan sebagai simpul koordinasi yang memastikan proses perencanaan berjalan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi, serta mampu menjawab tantangan Pembangunan daerah secara responsif dan adaptif.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan Pembangunan memiliki kebutuhan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak guna memperkuat fungsi perumusan kebijakan, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pengembangan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas SDM. KERJASAMA tersebut dilakukan untuk mendorong perbaikan kualitas perencanaan Pembangunan daerah secara lebih komprehensif, berbasis data, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

Kerjasama yang dilakukan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai pihak, antara lain :

1. Perguruan Tinggi dan Lembaga Akademik

KERJASAMA ini difokuskan pada penguatan kajian strategis, riset terapan, dan pengembangan sumber daya, melibatkan institusi terkemuka seperti:

- Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Universitas Indonesia (UI)
- Universitas Tarumanagara (UNTAR)
- Universitas Mulawarman (UNMUL)
- Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA)
- Politeknik/Polines

- Pusat Studi
 - Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PIIG).
2. Kementerian/Lembaga Teknis
KERJASAMA ini berorientasi pada sinkronisasi kebijakan, penyediaan data primer, dan dukungan teknis kelembagaan. Mitra utama meliputi:
 - Badan Informasi Geospasial (BIG)
 - Badan Pusat Statistik (BPS)
 3. Lembaga Riset Independen
KERJASAMA dengan lembaga riset non-pemerintah bertujuan untuk mendapatkan perspektif independen dan mendalam mengenai isu-isu strategis daerah. Contoh mitra:
 - Swasaba Research Initiative (SRI)
 4. Pihak Swasta dan Konsultan Profesional
KERJASAMA ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan teknis spesifik dan penyediaan jasa konsultasi profesional dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kajian. Contoh mitra:
 - CV. Corona Cemerlang

Adapun manfaat dari KERJASAMA dengan mitra tersebut, antara lain:

1. Memperkuat kualitas dokumen perencanaan Pembangunan daerah melalui dukungan akademis dan teknis.
2. Memperluas sumber data dan informasi yang valid untuk mendukung evidence-based planning.
3. Menghadirkan tenaga ahli yang tidak tersedia pada sumber daya internal.
4. Mendorong peningkatan kapasitas ASN Bappeda melalui pelatihan, workshop, dan transfer knowledge.
5. Mempercepat inovasi perencanaan daerah melalui pemanfaatan teknologi dan metodologi baru.
6. Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan isu Pembangunan strategis daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada berbagai permasalahan yang berkembang, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda, serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh sumber daya yang tersedia harus dikelola secara efektif, efisien, dan terintegrasi guna mendukung terwujudnya perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan.

Secara umum, pelaksanaan perencanaan Pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kemajuan, antara lain melalui pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran, penerapan sistem monitoring berbasis daring, serta meningkatnya keterlibatan stakeholder dalam forum Musrenbang. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius agar perencanaan Pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan arah Pembangunan nasional maupun provinsi.

Permasalahan utama Bappeda Kutai Kartanegara yang terkait tugas pokok dan fungsi adalah “**Belum optimalnya perencanaan Pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan selaras dengan arah Pembangunan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur**”. Penyebab permasalahan terjabar dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya perencanaan	Belum optimalnya sinergitas dan kualitas	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Pembangunan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan selaras dengan arah Pembangunan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur	perencanaan Pembangunan daerah	daerah, ditandai dengan rendahnya pemanfaatan aplikasi e-Pantau
			Perubahan regulasi yang tidak sinkron dengan tata kelola perencanaan daerah
			Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pendanaan Pembangunan daerah
			Belum optimalnya koordinasi analisis data dan informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perencanaan Pembangunan daerah
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi sebagai feedback dalam penyusunan rencana Pembangunan daerah
			Belum optimalnya proses perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based planning)
			Terbatasnya basis data Pembangunan yang valid dan mutakhir
			Kurangnya kompetensi perangkat daerah dalam perencanaan Pembangunan, baik dari sisi teknis perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi
		Belum optimalnya sinergitas Perencanaan	Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pembangunan Daerah pada Bidang-bidang	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta implementasi budaya kerja berbasis kinerja dan outcome di tingkat perangkat daerah
			Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta implementasi budaya kerja berbasis kinerja dan outcome di tingkat perangkat daerah
			Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta implementasi budaya kerja berbasis kinerja dan outcome di tingkat perangkat daerah
3		Belum optimalnya kualitas kelembagaan dalam mendukung kinerja Bappeda	Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bappeda
			Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Bappeda
			Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Bappeda

2.2.2 Isu Strategis

Penyelenggaraan perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada kondisi aktual yang mempengaruhi tata kelola perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan dalam jangka waktu ke depan. Apabila tidak diantisipasi secara tepat, isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas Pembangunan daerah, konsistensi kebijakan lintas sektor, serta kualitas pelayanan publik.

Berbagai tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi melalui analisis permasalahan, dinamika Pembangunan daerah, perkembangan regulasi, serta kebutuhan perencanaan berbasis data menjadi dasar dalam perumusan isu strategis ini. Isu-isu strategis ditentukan dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh terhadap pencapaian sasaran Pembangunan daerah di bidang perencanaan, luasnya dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan perangkat daerah, serta kemampuan untuk dikelola secara efektif oleh Bappeda sebagai leading sector perencanaan.

Tabel 2.10 Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan Bappeda dalam menjalankan tugas terkait	Belum optimalnya sinergitas dan kualitas perencanaan	Peningkatan Layanan Jasa Keuangan Keuangan	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah	an Pembangunan daerah	Daerah Peningkatan Anggaran Riset Pemerintah dan Swasta				Berbasis Kinerja
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Pemanfaatan Data dan Analisis Bukti dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Integrasi Perencanaan Sektoral dengan Aspek Kewilayahan dan Pemanfaatan Tata Ruang
Kewenangan Bappeda dalam koordinasi perencanaan daerah	Belum optimalnya sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang-bidang		Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Transformasi Fungsi Pengendalian dan Evaluasi untuk Mengukur Efektivitas Program dan Dampak Pembangunan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Integrasi sistem informasi perencanaan untuk mendukung transformasi digital
Kapasitas SDM dan sarana prasarana tercukupi	Belum optimalnya kualitas kelembagaan dalam mendukung kinerja Bappeda		Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Pengembangan Kompetensi SDM Perencanaan dalam Merespons Tren Perencanaan Modern dan Tantangan Digital
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik.	Peningkatan Peran Bappeda sebagai Inisiator dan Fasilitator Inovasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah

Tabel tersebut disusun sebagai hasil pemetaan antara potensi kewenangan daerah, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Setiap baris mencerminkan proses analitis dalam mengidentifikasi isu-isu prioritas yang relevan dan krusial untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tabel ini berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan arah Pembangunan daerah dengan agenda nasional maupun tren global yang berdampak langsung pada praktik perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan.

Isu-isu strategis yang disimpulkan merupakan refleksi dari kompleksitas tantangan dalam tata kelola Pembangunan daerah. Isu-isu tersebut tidak hanya bersumber dari kondisi lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan nasional dan global, seperti komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), agenda Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kebijakan nasional mengenai perencanaan dan pengendalian Pembangunan daerah.

1. Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja

Isu ini berfokus pada kebutuhan untuk menghilangkan kesenjangan antara dokumen perencanaan strategis (seperti RKPD dan RENSTRA) dengan alokasi sumber daya fiskal (APBD), memastikan bahwa anggaran daerah secara ketat mengikuti prioritas program yang telah ditetapkan dan diarahkan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang terukur, sehingga bukan sekadar penyerapan dana. Tantangannya adalah membangun sistem *money follow program* yang solid, di mana setiap rupiah dibelanjakan untuk kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama Pembangunan daerah.

2. Pemanfaatan Data dan Analisis Bukti dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan

Isu strategis ini menekankan pentingnya *evidence-based planning*, yaitu proses perumusan kebijakan yang didukung oleh analisis data yang valid, hasil riset akademis, dan evaluasi dampak program yang kredibel. Bappeda perlu memperkuat kapasitasnya dalam mengelola, mengolah, dan menganalisis data statistik, geospasial, maupun big data untuk mengidentifikasi akar permasalahan secara tepat dan merumuskan intervensi program yang akurat, sehingga meminimalkan risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran.

3. Integrasi Perencanaan Sektoral dengan Aspek Kewilayahan dan Pemanfaatan Tata Ruang

Tantangan utama isu ini adalah mengoptimalkan peran Bappeda sebagai integrator yang menjamin keselarasan antara rencana Pembangunan yang bersifat sektoral (dijalankan oleh OPD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kebutuhan Pembangunan di setiap kawasan geografis. Melalui integrasi ini, potensi konflik pemanfaatan ruang dapat dicegah, investasi infrastruktur menjadi lebih efisien, dan Pembangunan dapat diarahkan secara spasial untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah daerah.

4. Transformasi Fungsi Pengendalian dan Evaluasi untuk Mengukur Efektivitas Program dan Dampak Pembangunan

Isu ini mendorong pergeseran paradigma dari sistem monitoring dan evaluasi yang fokus pada input dan output (penyerapan anggaran) menuju pengukuran outcome dan dampak (*impact*) Pembangunan. Bappeda akan mengembangkan dan menerapkan metodologi evaluasi yang canggih untuk menilai sejauh mana program prioritas benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian target jangka menengah daerah, sehingga hasil evaluasi

dapat menjadi umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di periode perencanaan berikutnya.

5. Integrasi Sistem Informasi Perencanaan untuk Mendukung Transformasi Digital

Isu ini merupakan kunci dalam agenda transformasi digital Kabupaten Kukar yaitu berfokus pada optimalisasi dan integrasi menyeluruh sistem informasi perencanaan (termasuk SIPD) agar berfungsi sebagai platform tunggal yang transparan dan *real-time*. Keberhasilan integrasi sistem ini akan meningkatkan efisiensi birokrasi, meminimalisir duplikasi data, mempercepat proses koordinasi antar-OPD, serta mendukung transparansi perencanaan dan penganggaran kepada publik.

6. Pengembangan Kompetensi SDM Perencana dalam Merespons Tren Perencanaan Modern dan Tantangan Digital

Guna mempertahankan relevansi Bappeda sebagai *think-tank* daerah, isu ini menyoroti kebutuhan untuk menutup kesenjangan kompetensi SDM perencana dengan tuntutan metodologi perencanaan modern. Peningkatan kapasitas harus mencakup penguasaan teknik analisis kebijakan, *economic modelling*, manajemen big data, dan alat-alat digital terbaru agar Bappeda memiliki sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas tinggi.

7. Peningkatan Peran Bappeda sebagai Inisiator dan Fasilitator Inovasi dan Kerjasama Pembangunan Daerah

Bappeda sebagai motor penggerak untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah dan membangun kemitraan strategis. Bappeda harus secara proaktif mengidentifikasi dan memfasilitasi KERJASAMA dengan pihak swasta, lembaga riset, maupun pemerintah daerah lain, termasuk skema pembiayaan alternatif (seperti KPBU), guna mempercepat pelaksanaan program Pembangunan prioritas yang tidak dapat dibiayai hanya dari APBD.

Melalui analisis isu strategis tersebut, Bappeda dapat merumuskan arah kebijakan dan prioritas program yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap dinamika Pembangunan, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Pengelompokan isu berdasarkan sumber dan tingkatannya membantu menghasilkan strategi intervensi yang terukur, memperkuat integrasi antara perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, serta mendukung prinsip perencanaan Pembangunan yang berbasis bukti, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Visi dan misi setiap perangkat daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2). Selain itu, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Rencana Strategis periode tahun 2025-2029, sesuai dengan visi dan misi RPJMD, dimana kemudian diterjemahkan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan Pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

KUKAR IDAMAN TERBAIK

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni “Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai berikut.

1. **Maju**, Pokok visi ini berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, infrastruktur dan tata kelola. Pemerintah daerah berupaya menciptakan perekonomian yang inklusif dengan mengembangkan sektor unggulan

seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan memaksimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat pemberdayaan Masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup Masyarakat secara merata. Sehingga akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfokuskan diri untuk memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki, seperti kawasan Taman Nasional Kutai, wisata Sungai Mahakam, serta berbagai situs sejarah dan budaya Dayak. Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga diimbangi dengan penguatan infrastruktur daerah seperti penyediaan akses jalan dan penataan ruang yang baik sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, birokrasi pemerintahan sebagai penanggung jawab Pembangunan daerah juga menjadi perhatian agar tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

2. **Sejahtera**, pokok visi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dilandasi dengan budaya kearifan lokal. Pokok visi “sejahtera” juga diwujudkan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penyediaan hunian yang layak sehingga tercipta kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sehat, berdaya saing, dan memiliki karakter budaya yang kuat.
3. **Berkelanjutan**, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui Upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi

Pembangunan jangka panjang. Kutai Kartanegara berkomitmen menerapkan praktik ramah lingkungan melalui pengembangan industri hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Program rehabilitasi lahan kritis, pelestarian hutan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas penting dalam menjaga ekosistem. Dengan visi ini mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan Pembangunan saat ini tidak mengorbankan potensi generasi mendatang.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, misi Pembangunan sebagai berikut:

MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan Pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial

MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif

MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara

MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal

MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar Pembangunan kewilayahan yang berkeadilan

Melihat dari tugas dan fungsi dari pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah, Bappeda Kutai Kartanegara masuk dalam upaya mewujudkan visi pada misi ketiga yaitu Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara. Makna dari misi kelima yaitu Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi

Pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan Pembangunan daerah.

3.1 Tujuan Renstra PD

Tujuan adalah pernyataan hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini disusun berdasarkan penyelesaian isu-isu strategis, dengan fokus pada mendukung visi dan misi Pembangunan daerah, serta menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas dan pokok fungsi Bappeda mendukung ketercapaian sasaran daerah "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" dengan indikatornya Indeks Pelayanan Publik.

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas** yang diukur melalui **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah**.

Tujuan ini difokuskan pada penciptaan kondisi perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dan dukungan masyarakat. Dengan perencanaan yang terarah dan berbasis data serta mengacu pada evaluasi program sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan meningkatkan kinerja perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah. Implementasi dari tujuan ini diharapkan mampu meningkatkan capaian tujuan Pembangunan daerah.

3.2 Sasaran Renstra PD

Sasaran merupakan hasil spesifik yang ingin dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan secara

terukur, realistis, dan terarah, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan strategis Pembangunan daerah. Sasaran juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam konteks urusan perencanaan Pembangunan, sasaran yang ditetapkan tidak hanya menekankan pada penyusunan dokumen perencanaan semata, melainkan juga mencakup penguatan aspek pengendalian, evaluasi, serta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini diwujudkan melalui sasaran: **“Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah”**, yang diukur melalui **Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP)**.

Dengan meningkatnya akuntabilitas perencanaan, diharapkan kualitas tata kelola Pembangunan daerah semakin baik, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran meningkat, serta konsistensi antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan dapat terjamin.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata	Meningkatkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	71,00-80,00	71,00-80,00	71,00-80,00	81,00-90,00	81,00-90,00	81,00-90,00	
				(Cukup Baik)	(Cukup Baik)	(Cukup Baik)	(Baik)	(Baik)	(Baik)	
		Meningkatnya akuntabilitas perencanaan Pembangunan daerah	Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP)	21,91	21,97	22,02	22,07	22,13	22,19	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang										

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. SASARAN RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik										

Tabel tersebut menggambarkan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan selama periode perencanaan 2025–2029. Dengan adanya kedua indikator ini, Bappeda Kukar diharapkan mampu memastikan bahwa perencanaan Pembangunan daerah dilaksanakan secara akuntabel, berbasis kinerja, dan konsisten, sehingga dapat mendukung efektivitas Pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara. RInchian Definisi operasional dari indikator tersebut adalah:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator ini mengadopsi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang merupakan salah satu NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) terkait perencanaan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, namun mengalami beberapa penyesuaian sesuai kondisi daerah. Dengan tetap melihat komponen pada IPPN antara lain:

- 1) Sinergi Perencanaan
- 2) Kualitas Perencanaan
- 3) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

2. Nilai SAKIP komponen Perencanaan

Indikator ini merupakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk komponen “Perencanaan Kinerja”. Nilai komponen “Perencanaan Kinerja” ini menggambarkan hasil penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras, yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Komponen ini sendiri terdiri dari beberapa sub komponen, yaitu : (1) ketersediaan dokumen perencanaan; (2) dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar

yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain; serta (3) perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Strategi Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrumen strategis dalam memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2025–2029. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi perencanaan, Bappeda berperan dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan arah Pembangunan daerah agar selaras dengan visi dan misi Pembangunan daerah serta responsif terhadap dinamika kebijakan nasional dan perkembangan global. Strategi yang dirumuskan secara sistematis menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya Pembangunan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bappeda merumuskan strategi yang bersifat implementatif melalui penetapan program-program prioritas yang didukung oleh intervensi kebijakan yang terukur dan terarah. Penyusunan dan pelaksanaan strategi Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penahapan Pembangunan periode 2025–2030. Penahapan ini mencakup tahapan persiapan dan penyelarasan dokumen perencanaan, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya aparatur, hingga implementasi program strategis secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang bertahap, sistematis, dan berkesinambungan, diharapkan Pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berlangsung secara lebih fokus dan

konsisten, serta menghasilkan capaian Pembangunan yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pembangunan Daerah berbasis data dan informasi	Perencanaan Pembangunan yang sinergi	Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pembangunan	Koordinasi, sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan Berkelanjutan
Peningkatan Pembangunan daerah berbasis data dan informasi	Pemantapan perencanaan Pembangunan yang sinergi	Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pembangunan	Penguatan Koordinasi, sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan	Perwujudan perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan Berkelanjutan
Peningkatan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemantapan Pembangunan yang sinergi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penguatan Koordinasi, sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perwujudan perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan Berkelanjutan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Peningkatan Pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pemantapan Pembangunan yang sinergi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pembangunan bidang Perekonomian	Penguatan Koordinasi, sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan bidang Perekonomian	Perwujudan perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan Berkelanjutan bidang Perekonomian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pembangunan Daerah berbasis data dan informasi	Perencanaan Pembangunan yang sinergi	Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pembangunan	Koordinasi, sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan Berkelanjutan
		dan Sumber Daya Alam	dan Sumber Daya Alam	dan Sumber Daya Alam
Peningkatan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pemantapan Pembangunan yang sinergi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penguatan Koordinasi, sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perwujudan perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan Berkelanjutan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Peningkatan fungsi kelembagaan	Pemantapan fungsi kelembagaan yang sinergi	Pelaksanaan fungsi kelembagaan	Penguatan fungsi kelembagaan	Perwujudan fungsi kelembagaan

Adapun penahapan Pembangunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025–2029 dijabarkan melalui strategi berikut:

Tahap I (2026): “Pembangunan Daerah berbasis data dan informasi”

Pada tahap awal, Pembangunan daerah ke depan diarahkan untuk semakin berbasis pada data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Penguatan Pembangunan berbasis data ini menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa setiap intervensi Pembangunan tepat sasaran dan mampu menjawab

permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sejalan dengan itu, Pembangunan pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia terus didorong melalui peningkatan kualitas tata kelola, pelayanan publik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Di sisi lain, Pembangunan sektor perekonomian dan sumber daya alam diarahkan untuk mendorong produktivitas, hilirisasi, serta pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan pun menjadi prioritas melalui penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas, dan penataan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan layanan antarwilayah. Seluruh agenda tersebut diperkuat oleh peningkatan fungsi kelembagaan agar organisasi perangkat daerah semakin adaptif, responsif, dan mampu berinovasi dalam menghadapi dinamika Pembangunan yang semakin kompleks.

Tahap II (2027): “Perencanaan Pembangunan yang sinergi”

Pada tahap kedua, Perencanaan Pembangunan daerah diarahkan untuk semakin sinergis, integratif, dan berkesinambungan melalui pemantapan mekanisme perencanaan yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. Pemantapan perencanaan yang sinergi pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia dilakukan dengan memastikan harmonisasi program peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pada saat yang sama, pemantapan Pembangunan yang sinergi pada bidang perekonomian dan sumber daya alam difokuskan pada sinkronisasi agenda peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan daya saing, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di bidang infrastruktur dan kewilayahan, sinergi Pembangunan ditingkatkan melalui penyelarasan perencanaan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, serta penataan ruang yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan. Keseluruhan proses tersebut diperkuat dengan pemantapan fungsi kelembagaan yang sinergis, sehingga perangkat daerah mampu bekerja secara lebih terkoordinasi, adaptif, dan kolaboratif dalam mewujudkan tujuan Pembangunan daerah.

Tahap III (2028): “Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pembangunan”

Tahap ketiga ditandai dengan Pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kinerja Pembangunan merupakan pilar penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh program dan kegiatan, sehingga penyimpangan dapat diminimalkan dan capaian Pembangunan dapat terus ditingkatkan. Pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia, pengendalian dan evaluasi diarahkan untuk memantau efektivitas pelayanan publik, kualitas tata kelola, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sementara itu, pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, pengendalian dan evaluasi difokuskan pada kinerja sektor-sektor produktif, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Di bidang infrastruktur dan kewilayahan, kegiatan pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian Pembangunan infrastruktur dengan prioritas penataan ruang dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjamin keterpaduan Pembangunan antarwilayah. Seluruh rangkaian proses ini diperkuat melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan yang efektif, sehingga organisasi perangkat daerah mampu menjalankan tugas pengawasan, analisis, serta perbaikan berkelanjutan secara lebih terstruktur dan berkinerja tinggi.

Tahap IV (2029): “Koordinasi, sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan”

Pada tahap keempat, fokus diarahkan pada Koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi Pembangunan merupakan fondasi penting untuk memastikan seluruh proses Pembangunan berjalan secara terpadu, efisien, dan saling mendukung. Penguatan koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan antar perangkat daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kesenjangan pelaksanaan. Pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia, koordinasi dan kolaborasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang

terintegrasi lintas sektor. Pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, upaya sinkronisasi dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui sinergi antara sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Sementara itu, pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, koordinasi diperkuat untuk memastikan keterpaduan Pembangunan jaringan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta penataan ruang yang mendukung pemerataan layanan. Seluruh proses ini ditopang oleh penguatan fungsi kelembagaan, sehingga perangkat daerah mampu bekerja secara lebih harmonis, responsif, dan adaptif dalam melaksanakan kolaborasi Pembangunan di berbagai tingkatan.

Tahap V (2030): “ Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan Berkelanjutan”

Tahap terakhir diarahkan pada Perencanaan Pembangunan Daerah ke depan diarahkan untuk semakin terintegrasi dan berkelanjutan sebagai dasar dalam mewujudkan Pembangunan yang konsisten, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Perwujudan perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dilakukan dengan memastikan keterkaitan antarlevel perencanaan—mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota—serta konsistensi antara dokumen jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan. Pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia, integrasi perencanaan dilakukan melalui harmonisasi program yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan sosial, serta Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan inklusif. Sementara itu, pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, upaya integrasi dan keberlanjutan diwujudkan melalui pengembangan ekonomi daerah yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, peningkatan produktivitas, hilirisasi, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Di bidang infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan yang terintegrasi dilakukan untuk memastikan Pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, dan penataan ruang berjalan terpadu dan mendukung pemerataan layanan publik. Seluruh agenda

tersebut diperkuat melalui perwujudan fungsi kelembagaan yang lebih efektif, responsif, dan mampu mengkoordinasikan perencanaan secara kolaboratif guna memastikan Pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

3.4.1 Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi Pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi perangkat daerah. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi Pembangunan daerah serta relevan dengan isu-isu strategis di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan.

Perumusan arah kebijakan ini memperhatikan potensi dan tantangan Pembangunan daerah, dinamika hubungan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta kebutuhan akan tata kelola perencanaan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis data. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong partisipasi masyarakat dan pentahelix, serta memastikan pemerataan Pembangunan wilayah secara adil dan berkelanjutan.

Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bappeda	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NSPK : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan	Penyusunan sistem perencanaan- penganggaran terpadu	Pengembangan e- planning, integrasi big data sektoral, serta pemanfaatan dashboard	Bappeda sebagai motor penguatan SPBE di bidang perencanaan

No	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bappeda	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri		Pembangunan daerah berbasis SPBE	
2	Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan	Penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan Pembangunan baru	Pengembangan kapasitas ASN perencana melalui diklat teknis, sertifikasi perencana, serta kolaborasi riset dengan perguruan tinggi	Bappeda memperkuat profesionalisme SDM perencana
3	Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana		Peningkatan kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja perencanaan Pembangunan daerah	Pelayanan kesekretariatan
4	Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka	Penguatan mekanisme akuntabilitas Pembangunan berbasis kinerja	Penyusunan RKPD tahunan, penajaman RPJMD/RPJPD, integrasi RTRW dan KLHS, serta sinkronisasi perencanaan dengan prioritas nasional/IKN	Bappeda sebagai koordinator perencanaan daerah
5	Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. SASARAN RPJMD :		Penguatan monitoring dan evaluasi yang berbasis bukti untuk menjamin sinkronisasi dan efektivitas pencapaian 17 Program Dedikasi	Bappeda memastikan mengawal dan memastikan keberhasilan 17 Program Dedikasi

No	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bappeda	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Fasilitasi koordinasi lintas OPD melalui forum perangkat daerah, musrenbang, serta harmonisasi perencanaan berbasis wilayah/tematik	Bappeda memperkuat integrasi Pembangunan antar sektor
7			Penguatan sistem evaluasi kinerja Pembangunan (SAKIP daerah, evaluasi RPJMD, RKPD, IKU, IKD) dan pelaporan berbasis SIPD	Mendukung akuntabilitas dan transparansi Pembangunan
8			Penyelarasan rencana Pembangunan Kukar dengan kebutuhan IKN, integrasi kawasan penyangga, serta penetapan lokus Pembangunan strategis	Bappeda sebagai mitra strategis IKN
9			Penyusunan kajian strategis lintas isu (ekonomi hijau, transisi energi, tata ruang, hilirisasi pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif)	Bappeda mendukung evidence-based policy
10			Penerapan kaidah pengendalian Pembangunan (monitoring, evaluasi,	Memastikan Pembangunan berjalan konsisten sesuai

No	Operasionalisasi NSPK / Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bappeda	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pelaporan) berbasis SIPD & data spasial	rencana dan regulasi nasional
11			Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Keselarasan Perencanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatkan fungsi koordinasi antara Bidang dengan OPDnya
12		Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pembangunan	Optimalisasi mekanisme musrenbang partisipatif, keterlibatan pentahelix, serta pemanfaatan aplikasi usulan masyarakat	Bappeda menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan daerah

3.4.2 Pelaksanaan Program Dedikasi

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target Pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat.

Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mendukung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan Pembangunan.

Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 memastikan bahwa arah Pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Pembangunan yang efektif serta tepat sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memegang peran sentral sebagai motor penggerak perencanaan, pengendali, dan evaluator Pembangunan daerah. Dalam periode ini, fokus utama adalah mengawal secara ketat pelaksanaan 17 Program Dedikasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai janji politik Kepala Daerah dan acuan strategis untuk mencapai visi dan misi.

Arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait pelaksanaan program dedikasi diarahkan pada penguatan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) terpadu, yang tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran (output) tetapi juga pada capaian dampak (outcome) dari setiap

Program Dedikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Hal ini diwujudkan melalui sinkronisasi Renstra seluruh Perangkat Daerah dengan Program Dedikasi, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi untuk pelaporan yang akurat, serta pelaksanaan evaluasi berkala (semester dan tahunan) yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat. Tujuannya adalah memastikan setiap anggaran memberikan nilai tambah yang optimal dan seluruh Program Dedikasi tepat sasaran, tepat waktu, dan berkesinambungan dalam mewujudkan Kukar Idaman Terbaik. Berikut disajikan Program Dedikasi yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Program Unggulan KDH (Program Dedikasi) Masing-masing Bidang Perencanaan, 2025-2029

No	Program Dedikasi	Bidang Perencanaan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pendataan dan Penetapan Sasaran Tepat Guna	Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Lintas Sektor	Penyediaan dan Distribusi Makanan Bergizi yang Aman dan Berkelanjutan	Pelaksanaan Edukasi Gizi dan Perubahan Perilaku Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pendataan dan Penetapan Penerima Secara Tepat Sasaran	Penguatan Tata Kelola dan Mekanisme Penyaluran Dana	Peningkatan Akses dan Kesetaraan Pendidikan	Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Peserta Didik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemetaan dan Klasifikasi Lembaga Pendidikan Swasta/Pesantren	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Sekolah/Pesantren	Peningkatan Mutu Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Belajar	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penguatan Kurikulum, Karakter, dan Integrasi Keagamaan
4	Program Etam Sejahtera	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penguatan Basis Data dan Penetapan Sasaran Tepat Guna untuk program etam sejahtera	Penguatan Perlindungan Sosial dan Jaring Pengaman Ekonomi	Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Sosial Masyarakat	Penguatan Ketahanan Sosial dan Keluarga	Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program
5	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera.	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Penguatan Perencanaan dan Pemetaan Potensi Kawasan Ekonomi	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas Wilayah	Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Penguatan UMKM/IKM	Penguatan Investasi dan Kemitraan Pembangunan	Keberlanjutan, Inovasi, dan Ketahanan Ekonomi Kawasan
6	Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh;	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Penguatan Produksi, Produktivitas, dan Diversifikasi Usaha	Penguatan Infrastruktur, Sarana, dan Akses Permodalan Produktif	Penguatan Hilirisasi, Nilai Tambah, dan Akses Pasar	Ketahanan Iklim, Keberlanjutan, dan Inovasi Ekonomi Hijau

No	Program Dedikasi	Bidang Perencanaan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Perluasan Akses Pembiayaan Inklusif dan Tepat Sasaran	Penguatan Kapasitas dan Literasi Keuangan Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Penyalur dan Sistem Penjaminan Kredit	Peningkatan Produktivitas dan Akses Pasar bagi Penerima Kredit	Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Skema Kredit Daerah
8	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Penggiat Seni Budaya	Pelestarian Warisan Budaya dan Pengembangan Kearifan Lokal	Penguatan Ekosistem dan Infrastruktur Kebudayaan Daerah	Promosi, Kolaborasi, dan Hilirisasi Ekonomi Seni Budaya	Penguatan Tata Kelola, Apresiasi, dan Keberlanjutan Seni Budaya
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Pemetaan, Identifikasi, dan Penguatan Ekosistem Komunitas Kreatif	Penguatan Kapasitas, Inovasi, dan Literasi Digital Komunitas Kreatif	Dukungan Stimulus dan Pembiayaan bagi Komunitas Kreatif	Promosi, Jejaring Kolaboratif, dan Komersialisasi Produk Kreatif	Tata Kelola, Evaluasi, dan Keberlanjutan Ekosistem Kreatif Daerah
10	Program Pelayanan Publik Cerdas;	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Digitalisasi Layanan dan Integrasi Sistem Pemerintahan	Peningkatan Kompetensi dan Budaya Kerja Aparatur Pelayanan	Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Akses Layanan Digital	Inovasi, Kolaborasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik	Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Kualitas Layanan Publik
11	Program ASN Kukar Terbaik.	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN	Reformasi Sistem Kinerja dan Penghargaan ASN	Penguatan Integritas, Etika, dan Budaya Kerja ASN	Transformasi Digital dan Efisiensi Birokrasi ASN	Peningkatan Kesejahteraan, Kedisiplinan, dan Loyalitas ASN
12	Program RT Ku-Terbaik	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Kepemimpinan RT	Digitalisasi Administrasi dan Layanan RT	Peningkatan Kinerja dan Inovasi Layanan RT	Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Warga	Evaluasi, Apresiasi, dan Keberlanjutan Kinerja RT Terbaik
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pendataan dan Verifikasi Guru Ngaji secara Akurat dan Transparan	Peningkatan Kesejahteraan dan Penghargaan bagi Guru Ngaji	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Keilmuan Guru Ngaji	Kolaborasi dan Sinergi Program dengan Lembaga Keagamaan dan Desa	Evaluasi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan Program
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	Bidang Perencanaan Bidang	Penguatan Edukasi dan Kesadaran	Pengelolaan Sampah, Limbah,	Konservasi Sumber Daya Alam dan	Penguatan Tata Kelola dan Partisipasi	Adaptasi Perubahan Iklim

No	Program Dedikasi	Bidang Perencanaan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Perekonomian dan SDA	Lingkungan Masyarakat	dan Pencemaran Secara Terpadu	Rehabilitasi Ekosistem	Multi-Pihak dalam Pembangunan Hijau	dan Penerapan Ekonomi Hijau
15	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan Terpadu dan Penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas Antar-Desa	Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa	Kolaborasi Multi-Pihak dan Pembiayaan Inovatif Pembangunan Kawasan	Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Kawasan Perdesaan Berdaya Saing
16	Program Internet Desa Gratis.	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Akses Internet Desa	Penguatan Kapasitas Digital dan Literasi Teknologi Masyarakat Desa	Pemanfaatan Internet untuk Pelayanan Publik dan Tata Kelola Desa Cerdas	Pengembangan Ekonomi Digital dan Ekosistem UMKM Desa	Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Internet Desa
17	Program Permukiman Idaman Terbaik.	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan Kualitas Permukiman dan Rumah Layak Huni	Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Kawasan Permukiman	Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan Permukiman	Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Penataan Lingkungan Hunian	Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, dan Keberlanjutan Permukiman

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah yang dituangkan melalui tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perlu didukung dengan program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program urusan dan program penunjang urusan. Program urusan berfungsi untuk mencapai tujuan badan yang telah sinergikan dengan tujuan daerah sedangkan program penunjang urusan adalah program kesekretariatan yang berfungsi untuk melayani rumah tangga dalam rangka menunjang tujuan badan.

Dalam rangka menyusun program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 900.1-2850 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Selanjutnya, Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Sub Kegiatan:

- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan:

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan:

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan KERJASAMA Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sub Kegiatan:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil dari cascading kinerja urusan perindustrian dan urusan perdagangan, mulai dari tujuan, sasaran, outcome sampai ke output. Tujuan, sasaran, outcome sampai ke output Renstra merupakan kinerja yang ingin dicapai atau dihasilkan. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya Pembangunan. Untuk mengukur kinerja program dan kegiatan serta sub

kegiatan diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel teknik perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
"NSPK : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Meningkatkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas perencanaan Pembangunan daerah			Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP)		
			Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan				evaluasi kinerja perangkat daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
SASARAN RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah		5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian		5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	
				Terlaksananya layanan administrasi		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Umum perangkat daerah			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan		5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran RKPD dan RPJMD	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Capaian Program Prioritas Daerah		
					Persentase Capaian Kinerja Program Dedikasi Daerah		
				Tersedianya Dokumen Rencana Daerah Yang ditetapkan melalui Regulasi		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sinkronya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Usulan-usulan yang telah terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data- data Pembangunan dalam skema satu data Indonesia		5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pembangunan Daerah	
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbina Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembangunan Daerah		Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya laporan pengendalian dan evaluasi data dan informasi Pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksanannya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya Pelaksanaan KERJASAMA Daerah	Jumlah KERJASAMA Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan KERJASAMA Daerah	
				Tersusunnya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah berbasis digital		5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembangunan Manusia				
					Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
					Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
					Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA		
					Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Perekonomian dan SDA		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
					Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
					Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen perencanaan perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Tersusunnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terkoordinirnya penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen perencanaan perangkat daerah pada bidang perekonomian dan SDA		5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Terkoordinirnya penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				(RPJPD,RPJMD dan RKPD)	(RPJPD. RPJMD dan RKPD)	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Tersedianya Dokumen Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan		5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				dokumen perencanaan perangkat daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
				Terkoordinirnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				pada Bidang Infrastruktur	pada Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					pada Bidang Kewilayahan	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					46,601,29 1,935.00		38,942,45 4,827.00		35,149,43 9,001.36		36,478,80 6,966.29		39,186,63 5,092.41		41,335,37 6,003.31		237,730,29 5,985.37	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					36,598,79 4,501.00		31,017,45 4,827.00		28,324,43 9,001.36		28,853,80 6,966.29		30,311,63 5,092.41		32,810,37 6,003.31		187,916,50 6,391.37	
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36,598,79 4,501.00		31,017,45 4,827.00		28,324,43 9,001.36		28,853,80 6,966.29		30,311,63 5,092.41		32,810,37 6,003.31		187,916,50 6,391.37	
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	77.84	88.85	36,598,79 4,501.00	78.62	31,017,45 4,827.00	79.01	28,324,43 9,001.36	79.41	28,853,80 6,966.29	79.81	30,311,63 5,092.41	80.21	32,810,37 6,003.31	80.21	187,916,50 6,391.37	Sekretaris
5.01.01.2.01 Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persen	100	100	423,695,9 20.00	100	400,000,0 00.00	100	300,000,0 00.00	100	350,000,0 00.00	100	350,000,0 00.00	100	350,000,0 00.00	100	2,173,695,9 20.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Sekretariat
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	8	4	286,955,80 0.00	2	150,000,00 0.00	2	100,000,00 0.00	2	100,000,00 0.00	2	100,000,00 0.00	2	100,000,00 0.00	14	836,955,800 .00	Jabatan Fungsional Perencana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Perangkat Daerah																	Bidang Sekretariat
5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2	36,308,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	12	536,308,000.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Sekretariat
5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	77,355,500.00	1	100,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	6	527,355,500.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Sekretariat

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	23,076,620 .00	1	50,000,000 .00	1	50,000,000 .00	1	50,000,000 .00	1	50,000,000 .00	1	50,000,000 .00	6	273,076,620 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Sekretariat
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel		Persen	100	100	16,526,20 9,186.00	100	16,992,99 2,287.00	100	16,992,99 2,287.00	100	16,992,99 2,287.00	100	16,992,99 2,287.00	100	16,992,99 2,287.00	100	101,491,17 0,621.00	Subbagian Keuangan dan Aset

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/B ulan	1428	1458	16,216,844 ,386.00	1668	16,542,992 ,287.00	1668	16,542,992 ,287.00	1668	16,542,992 ,287.00	1668	16,542,992 ,287.00	1668	16,542,992 ,287.00	9799	98,931,805, 821.00	Subbagian Keuangan dan Aset
5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	6	6	309,364,80 0.00	5	425,000,00 0.00	5	425,000,00 0.00	5	425,000,00 0.00	5	425,000,00 0.00	5	425,000,00 0.00	31	2,434,364,8 00.00	Subbagian Keuangan dan Aset
5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	-	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	5	125,000,000.00	Subbagian Keuangan dan Aset
5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
Tersedianya dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah		Persen	100	100	119,892,400.00	100	350,000,000.00	100	300,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	1,819,892,400.00	Subbagian Keuangan dan Aset
5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	-	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	10	250,000,000.00	Subbagian Keuangan dan Aset
5.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	1	1	27,600,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	11	527,600,000.00	Subbagian Umum, Ketatalaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD																	an dan Kepegawaian
5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	-	2	50,000,000 .00	2	50,000,000 .00	2	50,000,000 .00	2	50,000,000 .00	2	50,000,000 .00	10	250,000,000 .00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	92,292,400 .00	4	150,000,00 0.00	4	100,000,00 0.00	4	150,000,00 0.00	4	150,000,00 0.00	4	150,000,00 0.00	23	792,292,400 .00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian		Persen	100	100	856,946,836.00	100	565,000,000.00	100	555,000,000.00	100	565,000,000.00	100	685,000,000.00	100	565,000,000.00	100	3,791,946,836.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	3	613,410,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	8	1,613,410,000.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	-	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	20	125,000,000.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,	Jumlah Dokumen Monitoring,	Dokumen	4	8	75,518,000.00	4	60,000,000.00	4	50,000,000.00	4	60,000,000.00	4	60,000,000.00	4	60,000,000.00	28	365,518,000.00	Subbagian Umum, Ketatalaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	an dan Kepegawaian
5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	30	168,018,836.00	25	280,000,000.00	25	280,000,000.00	25	280,000,000.00	35	400,000,000.00	25	280,000,000.00	165	1,688,018,836.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
Terlaksananya layanan administrasi Umum perangkat daerah		Layanan	100	100	3,291,662,230.00	100	2,156,959,800.00	100	1,752,868,974.36	100	2,140,236,939.29	100	2,156,959,800.00	100	2,156,959,800.00	100	13,655,647,543.65	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	6	1,100,000,000.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang Disediakan																	
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3	550,000,00 0.00	2	300,000,00 0.00	2	300,000,00 0.00	2	300,000,00 0.00	2	300,000,00 0.00	2	300,000,00 0.00	13	2,050,000,0 00.00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2	397,611,80 0.00	2	94,901,800 .00	2	94,901,800 .00	2	94,901,800 .00	2	94,901,800 .00	2	94,901,800 .00	12	872,120,800 .00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	2	270,000,00 0.00	2	50,000,000 .00	2	50,000,000 .00	2	50,000,000 .00	2	50,000,000 .00	2	50,000,000 .00	12	520,000,000 .00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material																		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Mate rial yang Disediakan	Paket	4	1	71,433,744 .00	4	86,250,000 .00	4	86,250,000 .00	4	86,250,000 .00	4	86,250,000 .00	4	86,250,000 .00	21	502,683,744 .00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	109	100	640,999,68 6.00	100	600,000,00 0.00	100	500,000,00 0.00	100	600,000,00 0.00	100	600,000,00 0.00	100	600,000,00 0.00	500	3,540,999,6 86.00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	5	374,307,00 0.00	5	100,000,00 0.00	5	50,000,000 .00	5	100,000,00 0.00	5	100,000,00 0.00	5	100,000,00 0.00	30	824,307,000 .00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	2	787,310,00 0.00	3	725,808,00 0.00	3	571,717,17 4.36	3	709,085,13 9.29	3	725,808,00 0.00	3	725,808,00 0.00	17	4,245,536,3 13.65	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	100	4,761,321,090.00	100	2,328,925,000.00	100	200,000,000.00	100	232,000,000.00	100	1,382,000,000.00	100	1,332,000,000.00	100	10,236,246,090.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	-	25	996,925,00 0.00	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	1	600,000,00 0	32	1,746,925,0 00.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	36	29	423,533,00 0.00	106	1,200,000, 000.00	2	50,000,000	2	50,000,000	106	1,200,000, 000.00	1	100,000,00 0	246	3,023,533,0 00.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	41	82	4,337,788, 090.00	12	132,000,00 0.00	12	100,000,00 0.00	12	132,000,00 0.00	12	132,000,00 0.00	12	632,000,00 0.00	142	5,465,788,0 90.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	100	4,086,335, 899.00	100	3,829,920, 000.00	100	3,829,920, 000.00	100	3,829,920, 000.00	100	3,829,920, 000.00	100	3,829,920, 000.00	100	23,235,935, 899.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	2,346,900, 000.00	12	1,800,000, 000.00	12	1,800,000, 000.00	12	1,800,000, 000.00	12	1,800,000, 000.00	12	1,800,000, 000.00	72	11,346,900, 000.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1,739,435, 899.00	12	2,029,920, 000.00	12	2,029,920, 000.00	12	2,029,920, 000.00	12	2,029,920, 000.00	12	2,029,920, 000.00	72	11,889,035, 899.00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	100	6,532,730, 940.00	100	4,393,657, 740.00	100	4,393,657, 740.00	100	4,393,657, 740.00	100	4,564,763, 005.41	100	7,233,503, 916.31	100	31,511,971, 081.72	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	21	21	143,970,12 0.00	8	205,870,12 0.00	8	205,870,12 0.00	8	205,870,12 0.00	8	205,870,12 0.00	8	205,870,12 0.00	61	1,173,320,7 20.00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																	
5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	26	150,242,62 0.00	25	208,122,62 0.00	25	208,122,62 0.00	25	208,122,62 0.00	25	208,122,62 0.00	25	208,122,62 0.00	151	1,190,855,7 20.00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel																		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	6	35,000,000 .00	2	25,000,000 .00	2	25,000,000 .00	2	25,000,000 .00	2	25,000,000 .00	2	25,000,000 .00	16	160,000,000 .00	Subbagian Umum, Ketatalaksana an dan Kepegawaian
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	8	6	4,242,506, 340.00	6	2,800,000, 000.00	6	2,800,000, 000.00	6	2,800,000, 000.00	6	2,800,000, 000.00	8	3,800,000, 000.00	38	19,242,506, 340.00	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	13	10	1,961,011, 860.00	10	1,154,665, 000.00	10	1,154,665, 000.00	10	1,154,665, 000.00	10	1,325,770, 265.41	20	2,994,511, 176.31	70	9,745,288,3 01.72	Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
URUSAN PERENCANAAN					10,002,49 7,434.00		7,925,000, 000.00		6,825,000, 000.00		7,625,000, 000.00		8,875,000, 000.00		8,525,000, 000.00		49,813,789, 594.00	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					4,398,376, 564.00		3,725,000, 000.00		2,925,000, 000.00		3,725,000, 000.00		4,375,000, 000.00		3,725,000, 000.00		22,873,376, 564.00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Persentase Keselarasan Indikator	Persen	100	100	4,398,376, 564.00	100	3,725,000, 000.00	100	2,925,000, 000.00	100	3,725,000, 000.00	100	4,375,000, 000.00	100	3,725,000, 000.00	100	22,873,376, 564.00	Bidang Perencanaan Pengendalian

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan Capaian Pembangunan Daerah	dan Target Sasaran RKPD dan RPJMD																	dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	Persen	93.74	100		100		100		100		100		100		100		Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Persentase Capaian Kinerja Program Dedikasi Daerah	Persen	80,21	100		100		100		100		100		100		100		
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																		
Tersedianya Dokumen Rencana Daerah Yang ditetapkan melalui Regulasi		Regulasi	3	3	1,976,687, 064.00	2	1,450,000, 000.00	2	1,100,000, 000.00	2	1,450,000, 000.00	2	2,100,000, 000.00	3	1,450,000, 000.00	11	9,526,687,0 64.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					-													

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKP D (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	364,777,00 0.00	2	200,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	200,000,00 0.00	2	400,000,00 0.00	2	200,000,00 0.00	12	1,514,777,0 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	525,233,66 8.00	2	450,000,00 0.00	2	350,000,00 0.00	2	450,000,00 0.00	2	600,000,00 0.00	2	450,000,00 0.00	12	2,825,233,6 68.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	90,000,000 .00	1	50,000,000 .00	1	50,000,000 .00	1	50,000,000 .00	1	150,000,00 0.00	2	50,000,000 .00	8	440,000,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																		Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lint as Perangkat Daerah	Berita Acara	26	72	70,801,000 .00	59	50,000,000 .00	59	50,000,000 .00	59	50,000,000 .00	59	100,000,00 0.00	59	50,000,000 .00	367	370,801,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	2	2	228,720,00 0.00	1	150,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	150,000,00 0.00	1	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	8	928,720,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Musrenbang Kecamatan																		
Tersedianya Usulan- Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	20	20	19,985,096 .00	20	100,000,00 0.00	20	50,000,000 .00	20	100,000,00 0.00	20	100,000,00 0.00	20	100,000,00 0.00	120	469,985,096 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJ MD/RKPD)	Dokumen	3	3	677,170,30 0.00	2	450,000,00 0.00	2	350,000,00 0.00	2	450,000,00 0.00	2	600,000,00 0.00	3	450,000,00 0.00	14	2,977,170,3 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya data-data Pembangunan dalam skema satu data Indonesia		Data	2583	3716	1,367,433,500.00	3800	1,050,000,000.00	3900	800,000,000.00	4000	1,050,000,000.00	4100	1,050,000,000.00	4200	1,050,000,000.00	4200	6,367,433,500.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	4	3	661,486,500.00	2	400,000,000.00	2	300,000,000.00	2	400,000,000.00	2	400,000,000.00	2	400,000,000.00	13	2,561,486,500.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	56	177	443,727,00 0.00	185	500,000,00 0.00	185	400,000,00 0.00	185	500,000,00 0.00	185	500,000,00 0.00	185	500,000,00 0.00	1102	2,843,727,0 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembanguna n Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	2	262,220,00 0.00	1	150,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	150,000,00 0.00	1	150,000,00 0.00	1	150,000,00 0.00	7	962,220,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03 Pengendalian , Evaluasi d an Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																		
Tersedianya laporan pengendalian dan evaluasi data dan informasi Pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan		Laporan	7	7	1,054,256, 000.00	6	700,000,0 00.00	6	600,000,0 00.00	6	700,000,0 00.00	6	700,000,0 00.00	6	700,000,0 00.00	37	4,454,256,0 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n Perencanaan dan Pelaksanaan Pembanguna n	Laporan	2	2	368,600,00 0.00	1	300,000,00 0.00	1	300,000,00 0.00	1	300,000,00 0.00	1	300,000,00 0.00	1	300,000,00 0.00	7	1,868,600,0 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan KERJASAMA Daerah																		
Terkendalinya Pelaksanaan KERJASAMA Daerah	Jumlah KERJASAMA Daerah yang Dikoordinasi kan Pelaksanaan nya	Kerjasam a	0	0	-	1	150,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	150,000,00 0.00	1	150,000,00 0.00	1	150,000,00 0.00	5	700,000,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersusunnya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembanguna n Daerah	Laporan	5	5	685,656,00 0.00	4	250,000,00 0.00	4	200,000,00 0.00	4	250,000,00 0.00	4	250,000,00 0.00	4	250,000,00 0.00	25	1,885,656,0 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																0		
Terselenggaranya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah berbasis digital		Sistem Informasi	0	0	-	6	525,000,0 00.00	6	425,000,0 00.00	6	525,000,0 00.00	6	525,000,0 00.00	6	525,000,0 00.00	30	2,525,000,0 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintah an Daerah di Bidang	Dokumen	0	0	-	6	75,000,000 .00	6	75,000,000 .00	6	75,000,000 .00	6	75,000,000 .00	6	75,000,000 .00	30	375,000,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pembanguna n Daerah yang Dikelola																	Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintaha n Daerah di Bidang Pembanguna n Daerah	Dokumen	0	0	-	6	150,000,00 0.00	6	150,000,00 0.00	6	150,000,00 0.00	6	150,000,00 0.00	6	150,000,00 0.00	30	750,000,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintaha	Dokumen	0	0	-	6	300,000,00 0.00	6	200,000,00 0.00	6	300,000,00 0.00	6	300,000,00 0.00	6	300,000,00 0.00	30	1,400,000,0 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN		
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Pemerintah Kabupaten/Kota	n Daerah di Bidang Pembanguna n Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota																	Pembangunan Daerah		
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGEMBANGUNAN DAERAH					5,604,120, 870.00		4,200,000, 000.00		3,900,000, 000.00		3,900,000, 000.00		4,500,000, 000.00		4,800,000, 000.00		26,940,413, 030.00			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintah dan Pembangun an Manusia	Persen	100	100	5,604,120, 870.00	100	4,200,000, 000.00	100	3,900,000, 000.00	100	3,900,000, 000.00	100	4,500,000, 000.00	100	4,800,000, 000.00	100	26,940,413, 030.00	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	Persen	94.55	100		100		100		100		100		100		100		100	100	
	Persentase Capaian Program Dedikasi	Persen	83,08	100		100		100		100		100		100		100		100	100	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN				
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
	Daerah Bidang Pemerintah dan Pembangun an Manusia																					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomi an dan SDA	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomi an dan SDA	Persen	93.65	100		100		100		100		100		100		100		100	100	100		
	Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Perekonomi an dan SDA	Persen	76,37	100		100		100		100		100		100		100		100	100	100		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastrukt	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	100	100	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	r dan Kewilayaha n																	
	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastrukt r dan Kewilayaha n	Persen	92,98	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Infrastrukt r dan Kewilayaha n	Persen	78,85	100		100		100		100		100		100		100		
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																		
Tersedianya dokumen Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokume n	72	76	1,161,005, 340.00	32	1,400,000, 000.00	32	1,300,000, 000.00	32	1,300,000, 000.00	32	1,450,000, 000.00	32	1,600,000, 000.00	236	8,247,297,5 00.00	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia																		
5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
Terkoordinirnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintah a n yang Dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	11	110,632,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	21	860,632,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	Laporan	11	11	76,892,570 .00	11	150,000,00 0.00	11	150,000,00 0.00	11	150,000,00 0.00	11	150,000,00 0.00	11	150,000,00 0.00	66	826,892,570 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n																	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n	Laporan	11	11	85,908,840 .00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	16	585,908,840 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	2	223,060,77 0.00	1	300,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	300,000,00 0.00	1	400,000,00 0.00	7	1,723,060,7 70.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	12	13	81,408,640 .00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	23	867,700,800 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	Laporan	12	13	76,706,180 .00	13	150,000,00 0.00	13	150,000,00 0.00	13	150,000,00 0.00	13	150,000,00 0.00	13	150,000,00 0.00	78	826,706,180 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah	Laporan	12	13	63,408,840 .00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	18	563,408,840 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Bidang Pembanguna n Manusia																	
5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembanguna n Manusia	Laporan	2	2	442,987,50 0.00	1	300,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	350,000,00 0.00	1	400,000,00 0.00	7	1,992,987,5 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																		
Tersedianya dokumen Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen perencanaan		Dokume n	37	40	2,889,144, 300.00	19	1,400,000, 000.00	19	1,300,000, 000.00	19	1,300,000, 000.00	19	1,550,000, 000.00	19	1,600,000, 000.00	135	10,039,144, 300.00	Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
perangkat daerah pada bidang perekonomian dan SDA																		
5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia n yang Dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n yang Dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	6	100,518,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	16	850,518,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	Laporan	6	6	88,328,450 .00	6	150,000,00 0.00	6	150,000,00 0.00	6	150,000,00 0.00	6	150,000,00 0.00	6	150,000,00 0.00	36	838,328,450 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n																	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n	Laporan	6	6	64,658,000 .00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	11	564,658,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	4	1,603,830, 200.00	1	400,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	400,000,00 0.00	1	400,000,00 0.00	9	3,303,830,2 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	111,180,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	15	861,180,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perangkat Daerah Bidang SDA																		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	5	88,527,750 .00	5	150,000,00 0.00	5	150,000,00 0.00	5	150,000,00 0.00	5	150,000,00 0.00	5	150,000,00 0.00	30	838,527,750 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	5	53,586,000 .00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	10	553,586,000 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	3	778,515,90 0.00	1	200,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	350,000,00 0.00	1	400,000,00 0.00	8	2,228,515,9 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																		
Tersedianya dokumen Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen perencanaan perangkat daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen	75	8	1,553,971, 230.00	32	1,400,000, 000.00	32	1,300,000, 000.00	32	1,300,000, 000.00	32	1,500,000, 000.00	32	1,600,000, 000.00	209	8,653,971,2 30.00	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
Terkoordinirnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastrukt ur yang Dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	1	125,584,15 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	12	875,584,150 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastrukt ur	Laporan	4	1	93,367,540 .00	4	150,000,00 0.00	4	150,000,00 0.00	4	150,000,00 0.00	4	150,000,00 0.00	4	150,000,00 0.00	21	843,367,540 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastrukt ur	Laporan	4	1	59,830,440 .00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	6	559,830,440 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM	Laporan	2	1	428,551,80 0.00	1	350,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	350,000,00 0.00	1	400,000,00 0.00	6	2,028,551,8 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	D pada Bidang Infrastrukturu																	
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	20	1	111,939,44 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	2	150,000,00 0.00	11	861,939,440 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	Laporan	20	1	92,917,420 .00	20	150,000,00 0.00	20	150,000,00 0.00	20	150,000,00 0.00	20	150,000,00 0.00	20	150,000,00 0.00	120	842,917,420 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	dan Kewilayahan
5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	20	1	46,731,440 .00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	1	100,000,00 0.00	25	546,731,440 .00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	3	595,049,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	250,000,00 0.00	1	350,000,00 0.00	1	400,000,00 0.00	8	2,095,049,0 00.00	Jabatan Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengemban peran strategis dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan cita-cita daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi "Kukar Idaman Terbaik: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan" menuntut semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkontribusi. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kontribusi ini diwujudkan melalui program prioritas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini dilakukan dengan mengarah pada peningkatan kualitas perencanaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan dampak program prioritas dalam Pembangunan daerah.

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Program ini mendukung MISI 5 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar Pembangunan kewilayahan yang berkeadilan; dengan program dedikasi yaitu program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik
		Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Program ini mendukung MISI 2 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif dengan program dedikasi yaitu Program

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kredit Kukar Idaman Terbaik
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Program ini mendukung MISI 2 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif dengan program dedikasi yaitu Penyusunan Perencanaan Program Petani/Nelayan Tangguh Kutai Kartanegara
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1. Program ini mendukung MISI 2 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif dengan program dedikasi yaitu Program Kredit Kukar Idaman Terbaik 2. Program ini mendukung MISI 2 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif dengan program dedikasi yaitu Program Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kawasan Ekonomi Sejahtera.

Seluruh program dan kegiatan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program tersebut dilengkapi dengan indikator yang jelas dan terukur, serta perencanaan pendanaan yang mendukung pelaksanaan secara efektif, efisien , dan berkelanjutan.

Diharapkan program ini mampu menjawab tantangan perencanaan Pembangunan, serta mendorong peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Lebih lanjut, sebagai motor perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengartikulasikan mandat politik dan aspirasi masyarakat melalui 17 Program Dedikasi yang telah ditetapkan. Program-program ini berfungsi sebagai instrumen utama (trigger) dan menjadi roh Pembangunan yang menopang lima Misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Seluruh Program Dedikasi ini telah diintegrasikan secara menyeluruh, memastikan setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah memiliki kontribusi langsung dan terukur terhadap pencapaian janji politik tersebut.

Pencapaian Visi 'Kukar Idaman Terbaik' memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar-Perangkat Daerah pelaksana. Oleh karena itu, 17 Program Dedikasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, melainkan melibatkan alokasi sumber daya dan koordinasi lintas sektor yang ketat. Misalnya, Program Makan Bergizi Gratis di bidang kesehatan, Program Kredit Kukar Idaman Terbaik di sektor ekonomi, hingga Program RT Ku-Terbaik dalam tata kelola pemerintahan, setiap program memiliki target kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai koordinator, memastikan bahwa indikator kinerja setiap OPD selaras dan saling mendukung untuk memaksimalkan dampak, sehingga tidak hanya sekadar penyerapan anggaran.

Untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan, seluruh Program Dedikasi ini akan menjadi dasar utama dalam proses Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan daerah. Pengawasan dan Evaluasi Berbasis Bukti akan diterapkan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta mengukur capaian outcome. Indikator kinerja yang disajikan di bawah ini merupakan tolok ukur keberhasilan yang akan dievaluasi secara periodik untuk selanjutnya menghasilkan rekomendasi kebijakan, sehingga mendorong keberhasilan pelaksanaan 17 Program Dedikasi. Indikator kinerja program dedikasi ditunjukkan oleh tabel 4.4 dengan penyandingan terhadap

program nomenklatur. Adapun penilaian kinerja program dedikasi ditunjukkan oleh tabel 4.5.

Tabel 4.4 Target Kinerja Program Dedikasi

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Perumusan Regulasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka		70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Indeks Zakat Nasional	Angka		0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan	Dokumen	1,00						Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB									
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan/PKK/RT/LPM dalam penyediaan makanan bergizi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Penyediaan Sarana dan	ADAT HUKUM ADAT			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Prasarana Pendukung Posyandu				an (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat								at dan Desa	Pembangunan Manusia
				"Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3.195,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Pelakunya Hukum	Hukum Adat"										
				Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota"	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Kemasyarakatan Kelembagaan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	14,00	2.199,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					at Hukum Adat										
		Pendampingan Kader Posyandu Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG			Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persen		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Kontrol Keamanan dan Gizi Makanan	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen		36,50	36,50	36,50	37,00	37,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Persen		40,11	36,79	33,48	30,16	26,85	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen		84,50	85,50	86,50	87,50	88,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen		72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen		83,00	83,00	86,00	86,00	86,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen		80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen		82,78	82,78	83,50	84,00	85,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen		7,60	7,60	7,60	7,50	7,40	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Cakupan penemuan kasus TB	Persen		80,00	85,00	90,00	91,00	91,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Ibu maternal risiko	Persen		92,00	93,00	93,00	94,00	95,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						tinggi/komplikasi yang ditangani									Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Prevalensi Wasting pada balita (Diganti Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi buruk) pada balita)	Persen		9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	Persen		70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Insidensi Stunting Balita (kasus baru)	Persen		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															Pembangunan Manusia
						Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka		432,00	370,00	325,00	292,00	266,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Eliminasi Kusta	Persen		0,20	0,15	0,10	0,05	0,05	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	8 Dapur	88 Dapur	126 Dapur	163 Dapur	200 Dapur	237 Dapur	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung PAUD Dukungan Operasional PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen		99,80	99,85	99,90	99,95	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						APS PAUD	Nilai		67,01	70,26	73,50	76,75	80,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															Pembangunan Manusia
						Persentase anak usia 13-15 tahun Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (APS)	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Nilai		91,71	93,71	95,71	97,71	99,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Nilai		90,71	92,71	94,71	96,71	98,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Nilai		85,02	87,02	89,02	91,02	93,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	Nilai		70,38	72,38	74,38	76,38	78,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	12.679,00	13.679,00	10.621,00	8.621,00	6.621,00	4.621,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	500,00	523,00	547,00	554,00	562,00	566,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pendampingan dan fasilitasi standard dapur sehat	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persen		80,30	80,30	80,30	80,40	80,40	Dinas Dalduk dan KB	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Kehamilan Tidak	Persen		10,70	9,60	8,90	8,40	8,10	Dinas Dalduk dan KB	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Direncanakan (KTD)									dan Pembangunan Manusia
						Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persen		4,70	10,40	23,10	27,00	30,00	Dinas Dalduk dan KB	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	77,00	40,00	41,00	46,00	50,00	60,00	Dinas Dalduk dan KB	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Kesertaan Ber-KB											
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	Penyediaan Kebijakan Perlengkapan Sekolah Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Di Kelola Sekolah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	1,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1,00	2,00	2,00	3,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Penguatan Kapasitas dan Manajemen Dana BOSKAB	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen		99,80	99,85	99,90	99,95	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pendanaan Beasiswa Sekolah				APS PAUD	Nilai		67,01	70,26	73,50	76,75	80,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Desain Kebijakan Boarding School (SMP)				Persentase anak usia 13-15 tahun Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (APS)	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pembangunan/Pengembangan Sekolah (SMP) Berasrama Bersubsidi				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Nilai		91,71	93,71	95,71	97,71	99,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Nilai		90,71	92,71	94,71	96,71	98,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Nilai		85,02	87,02	89,02	91,02	93,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	Nilai		70,38	72,38	74,38	76,38	78,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Peningkatan Kapasitas Pengelola	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					an Dana BOS Sekolah Dasar	dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	214,00	216,00	218,00	218,00	220,00	220,00		
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	856,00	864,00	872,00	872,00	880,00	880,00		
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	500,00	523,00	547,00	554,00	562,00	566,00		
					Peningkatan	Jumlah Tenaga yang	Orang	576,00	593,00	614,00	626,00	650,00	650,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD									
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3.015,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima	Peserta Didik	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				/Kesetaraan	al/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik									
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		1,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
							Unit			1,00	1,00	1,00			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum Sekolah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Konektivitas Darat	Rasio		0,11	0,19	0,26	0,30	0,30	Dinas Perhubungan	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen		41,45	56,09	70,73	85,36	100,00		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko	Unit		6,00	5,00	2,00			Dinas Perhubungan	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ta yang Tersedia									
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit		2,00	2,00	2,00				
		Desain Kebijakan Beasiswa Kukar Idaman Terbaik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka		70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Indeks Zakat Nasional	Angka		0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas	Dokumen	1,00						Sekretariat Daerah (Bagian Kesra/Bagian Hukum)	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Operasional Kelembagaan		Pelaksanaan Kebijakan	Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		an Pengelola Dana Beasiswa		Kesejahteraan Rakyat	n Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas	Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas								(Bagian Kesra)	dan Pembangunan Manusia
		Pendanaan Beasiswa Perguruan Tinggi Tuntas dan Beasiswa Stimulan		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan	Dokumen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
									1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
									200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Masyarakat	dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas									
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/ Pondok Pesantren Idaman Terbaik	Penyediaan Petunjuk Teknis Kerjasama Dukungan Pembiayaan pada Sekolah Swasta dan Pesantren (Pola Kerjasama Antara Sekolah Swasta/ Pesantren dan Dikbud)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka		70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	Sekretariat Daerah	
						Indeks Zakat Nasional	Angka		0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	Sekretariat Daerah	
				Fasilitasi KERJASAMA Daerah	Fasilitasi KERJASAMA Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi KERJASAMA Dalam Negeri	Dokumen	1,00						Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahter	Fasilitasi Pengelolaan Bina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	Dokumen	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra/Ba	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		dan pemberdayaan bagi Sekolah Swasta dan Pesantren		aan Rakyat	Mental Spiritual	Bina Mental Spiritual								gian Hukum)	Pembangunan Manusia
		Bantuan Biaya Siswa Sekolah Swasta	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen		99,80	99,85	99,90	99,95	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						APS PAUD	Nilai		67,01	70,26	73,50	76,75	80,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase anak usia 13-15 tahun Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Pertama (APS)	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Nilai		91,71	93,71	95,71	97,71	99,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Nilai		90,71	92,71	94,71	96,71	98,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Nilai		85,02	87,02	89,02	91,02	93,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	Nilai		70,38	72,38	74,38	76,38	78,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	Siswa		5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	Dinas Pendidikan dan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				n Sekolah Dasar	Didik Sekolah Dasar	Menerima Biaya Personil Peserta Didik								Kebudayaan	Pembangunan Manusia
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa		2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00		
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa		15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00		
4	Program Etam Sejahtera	Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen		80,00	85,00	87,00	88,00	90,00	Dinas Sosial	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Penerima	Persen		6,54	9,82	13,09	16,36	19,63		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi									
						Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen		80,00	85,00	90,00	95,00	100,00		
						Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks		61,00	62,00	63,00	64,00	65,00		
						Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	Indeks		44,00	45,00	46,00	47,00	48,00		
						Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi	Persen		6,54	9,82	13,09	16,36	19,63		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						dari Kemiskinan									
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25,00	25,00	40,00	25,00	25,00	25,00		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	30,00	50,00	50,00	30,00	50,00		
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Orang	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Kabupaten/Kota									
		Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
						Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
						Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
						Persentase Pemerlu Pelayanan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya									
						Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Nilai		46,00	51,00	55,00	59,00	59,00		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	820,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				di Luar Panti Sosial											
		BPJS Ketenagakerjaan (Pekerja Rentan)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	48.729,00	48.729,00	48.729,00	48.729,00	48.729,00	48.729,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	Persen		53,90	65,43	76,95	88,48	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	90,00	350,00	480,00	480,00	480,00	480,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					10 (Sepuluh) Ha										
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	Persen		43,66	60,56	77,46	88,73	100,00		
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen		10,79	16,25	17,22	21,55	27,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Persentase Fasilitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen			1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pengembangan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri dan Kukar Siap Kerja, serta Kerjasama Dunia	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen		24,43	26,85	29,00	30,93	32,66	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pelayanan antar Kerja di	Penyelenggaraan Unit	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	15,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Dinas Tenaga Kerja dan	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Usaha dan Pemkab Terhadap Pekerja Disabilitas		Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD								Transmigrasi	dan Pembangunan Manusia
		Pengembangan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri dan Kukar Siap Kerja, serta Kerjasama Dunia Usaha dan Pemkab Terhadap Pekerja Disabilitas	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen		22,93	23,12	23,47	23,78		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	254,00	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pengembangan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri dan Kukar Siap Kerja, serta Kerjasama Dunia Usaha dan Pemkab Terhadap Pekerja Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING			Rasio Wirausaha Pemuda	Persen		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00		Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			KEPEMUDAAN	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	176,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	Dinas Pemuda dan OlahRaga	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Penguatan Layanan Berobat Cukup dengan KTP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persen		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen		36,50	36,50	36,50	37,00	37,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Persen		40,11	36,79	33,48	30,16	26,85	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Tingkat kepuasan pasien terhadap	Persen		84,50	85,50	86,50	87,50	88,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						layanan kesehatan									Pembangunan Manusia
						Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen		72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen		83,00	83,00	86,00	86,00	86,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan	Persen		80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						perbekalan kesehatan sesuai standar									Pembangunan Manusia
						Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen		82,78	82,78	83,50	84,00	85,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen		7,60	7,60	7,60	7,50	7,40	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Cakupan penemuan kasus TB	Persen		80,00	85,00	90,00	91,00	91,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	Persen		92,00	93,00	93,00	94,00	95,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Prevalensi Wasting pada balita (Diganti Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi buruk) pada balita)	Persen		9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	Persen		70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Insidensi Stunting Balita (kasus baru)	Persen		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Insidensi Tuberkulosis	Angka		432,00	370,00	325,00	292,00	266,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						(per 100.000 penduduk)									Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Eliminasi Kusta	Persen		0,20	0,15	0,10	0,05	0,05	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	250.000,00	214.566,00	238.566,00	262.566,00	286.566,00	310.566,00	Dinkes	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera.	Penyiapan Rencana Pengemban gan Kawasan Ekonomi Sejahtera di Kutai Kartanegar a	PROGRAM KOORDINA SI DAN SINKRONIS ASI PERENCAN AAN PEMBANG UNAN DAERAH			Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Perencanaan Bidang	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	Laporan		1,00					Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Infrastruktur dan Kewilayah an	aan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayah an									dan Pembangunan Manusia
		Penyediaan Standard Regulasi Kawasan Ekonomi Khusus	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan	Angka		65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	Bag. SDA/Setkab	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan	Dokumen		1,00					Bag. SDA/Setkab	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian UKM Penanaman Modal Tenaga Kerja									
		Penyediaan Perencanaan Pembangunan Industri Berbasis Non Ekstraktif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen		2,05	2,57	3,09	3,61	4,13	Disperindag	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1,00						Disperindag	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Rekomendasi Kebutuhan	Rekomendasi Kebutuhan	Jumlah rekomendasi kebutuhan	Rekomendasi		1,00						

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					an Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri									
		Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen		68,87	76,96	84,80	91,78	100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		1,00	1,00				Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Penyiapan Lahan	PROGRAM PENATAGU NAAN TANAH			Persentase tanah yang dilakukan Penatagunaan	Persen		80,00	81,00	82,00	83,00	84,00		
						Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan	Persen		45,00	50,00	60,00	70,00	80,00		
				Pengguna an Tanah yang Hamparan nya dalam satu Daerah Kabupate n/Kota	Koordina si dan Sinkronis asi Perencan aan Penggun aan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta	Dokum en		1,00						
		Pembangun an Infratstrukt ur Pendukung Kawasan	PROGRAM PENYELEN GGARAAN JALAN	Penyeleng garaan Jalan Kabupate n/Kota		Tingkat Kemantapan Jalan	Persen		65,98	66,48	66,48	67,23	67,79	Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
					Penyusu nan Rencana Kebijaka	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan	Dokum en			3,00				Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					n Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun									dan Kewilayahan
					Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Km			5,00	5,00	5,00	5,00		
					Rekonstruksi jalan	Panjang Jalan direkonstruksi	Km			20,00	20,00	20,00	20,00		
		Kerjasama Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN			Realisasi total terhadap target investasi	Persen		17,77	18,12	18,49	18,54	19,23	Dinas Penanaman Modal	Bidang Perencanaan Bidang

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			IKLIM PENANAMAN MODAL											dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Perekonomian dan SDA
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Badan usaha			5,00	5,00	5,00	5,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Peningkatan Kinerja Pengairan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Persen		29,46	32,18	34,76	36,71	38,71	Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari	Persen		6,94	8,60	8,60	8,60	8,60	Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						abrasi dan banjir rob									dan Kewilayahan
						Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik	Persen		73,53	74,33	75,23	75,95	76,68	Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	KM	43,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
					Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	KM		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	11,50	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63		
					Operasi dan Jaringan	Panjang Jaringan	KM		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara									
6	Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh;	Penyusunan Perencanaan Program Petani/Nelayan Tangguh Kutai Kartanegara	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA									dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Infrastruktur dan Kewilayahan									Pembangunan Manusia
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1,00						Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Penyusunan Regulasi Daerah Tentang Program Stimulus Petani, Peternak	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan	Angka		65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	Bag. SDA/Setkab	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		dan Nelayan		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian UKM Penanaman Modal Tenaga Kerja	Dokumen	1,00						Bagian SDA/Setkab	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Fasilitasi Pembangunan SPBN		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		1,00	1,00				Bagian Ekonomi/Setkab	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Fasilitasi Pembangunan SPBN	PROGRAM PENGELOLAAN			Produksi Perikanan Tangkap	Ton		162,59	182.916,17	206.329,44	232.945,94	263.228,91	Diskanalut	Bidang Perencanaan Bidang

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			PERIKANAN TANGKAP												Perekonomian dan SDA
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Perikanan	Rekomendasi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Diskanlut	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Pelaksanaan Program		Pemberdayaan	Penyediaan	Jumlah Sarana dan	Unit	577,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Stimulus Petani/Peternak/Nelayan Tangguh		Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Pembedayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Prasarana Pembedayaan Usaha Nelayan Skala Kecil									
		Pelaksanaan Program Stimulus Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase SDM Binaan Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen		5,06	5,59	6,01	6,64	7,51		Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Difasilitasi dan Dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	10 Unit	26 Unit (SPR 2 Unit, SL 5 Unit & Magan	34 Unit (SPR 5 Unit, SL 10 Unit & Magan	34 Unit (SPR 5 Unit, SL 10 Unit & Magan	34 Unit (SPR 5 Unit, SL 10 Unit & Magan	34 Unit (SPR 5 Unit, SL 10 Unit & Magan	Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					k Tani Tingkat Kabupaten/Kota				g 19 Unit)	g 19 Unit)	g 19 Unit)	g 19 Unit)	g 19 Unit)		
		Pelaksanaan Program Stimulus Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Produksi Tanaman Pangan	Ton		136.270,00	138.252,00	140.313,00	142.428,00	144.628,00	Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Produksi Hortikultura	Ton		80,97	82,05	83,15	84,27	85,40	Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Produksi Komoditas Peternakan	Kg		42.440.469,00	48.399.110,00	55.199.184,00	62.960.188,00	71.818.686,00	Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernnya dari Daerah Kabupaten	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	2.320 Ekor	2.890 ekor	3.012 ekor	3.045 ekor	3.052 ekor	3.074 ekor	Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	n/Kota Lain										
				Pengawasan Penggunan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pengawasan Penggunan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Lapran	65,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Disbun	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Pelaksanaan Program Stimulus Petani/Peternak/Nelay	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN			Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi	Persen		47,06	52,94	58,82	64,71	70,59		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		an Tangguh	PRASARANA PERTANIAN			LP2B/Yang Terlayani Prasarana Pertanian									
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Pelaksanaan Program Stimulus Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Produksi Perikanan Budidaya	Ton		243,89	274.374,25	309.494,16	349.418,90	394.843,36	Diskanlut	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta	Kelompok	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Diskanlut	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	633,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		Pelaksanaan Program Stimulus Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	PROGRAM PENINGKATAN			Skor Pola Pangan Harapan	Skor		94,00	94,50	95,00	95,50	96,00		
			DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan	Penguatan Lumbung Pangan	Jumlah LPM yang terfasilitasi	Kelompok	4,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Diketahui	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Pangan Kabupaten/Kota	Masyarakat (LPM)										
		Pelaksanaan Program Stimulus Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.	Review Kebijakan Kredit Kukar Idaman	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Angka		65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Dan Pembangunan									
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1,00						Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi/ Bagian Hukum)	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Strategi optimalisasi BUM Desa dan Koperasi sebagai Penggerak Perekonomian Desa/Kelurahan melalui Program Permodalan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Pembangunan Manusia									
						Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Dokumen	1,00						BAPPEDA	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Kerjasama Program KKI Terbaik dengan Bank	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHT			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	Angka		70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	Sekretariat Daerah	

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			ERAAN RAKYAT			dan Kesejahteraan Rakyat									
						Indeks Zakat Nasional	Angka		0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi KERJASAMA Dalam Negeri	Dokumen		1,00					Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan BUMDesa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen		10,79	16,25	17,22	21,55	27,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	Dokumen		3,00	7,00	8,00	8,00	7,00	DPMD	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
						Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng									

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				garaan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa dan Lembaga KERJASAMA antar Desa	Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga KERJASAMA antar Desa									Pembangunan Manusia
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen		53,28	54,74	56,20	58,39	60,58	Diskop UMKM	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen		2,00	2,00	2,50	3,00	3,00	Diskop UMKM	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Orang		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Diskop UMKM	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Fasilitasi UMKM mendapatkan Kredit	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Persentase Usaha Mikro Naik Kelas**	Persen		1,0024	1,0098	1,0170	1,0472	1,0865	Diskop UMKM	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen		2.173,00	2.656,00	3.130,00	3.926,00	4.419,00	Diskop UMKM	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Diskop UMKM	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Kajian Penyertaan modal ke bank yang ditunjuk untuk	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Nilai		12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		pelaksana program kredit				Indeks Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD	Nilai		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai		13,1997	13,1200	13,1210	13,1220	14,0000	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Penyerapan anggaran	Nilai		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Fasilitasi Akses UMK Sektor Ekraf	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1,00						BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki	Persen		15,29	18,12	19,80	20,36	20,36	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
8	Program Penguatan Peggiat Seni dan Budaya Daerah.	Pembentukan Lembaga Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen		75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	Disdikbud	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Kesenian Tradisional	Lembaga		1,00					Disdikbud	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Kabupaten/Kota											
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Komunitas Seni dan Budaya Daerah		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Disdikbud	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Komunitas Seni dan Budaya Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Komunitas Seni dan Budaya Daerah		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat dalam	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan	Objek	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Daerah Kabupaten/Kota	n Kebudayaan										
		Pelaksanaan Event Seni dan Budaya Daerah Berkelanjutan			Perlindungan Pengembangan Objek Pemanfaatan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan	Objek	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Disdikbud	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Budaya Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi	Lokasi		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					an Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Penyusunan Dokumen Re-Visioning Pulau Kumala Sebagai Pusat KULINER, SENI DAN BUDAYA			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	lokasi		1,00					Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Pembangunan Pulau Kumala sebagai Destinasi Wisata Olah Raga, Seni dan Budaya Daerah			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)	Lokasi			1,00	1,00			Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Unggulan Kabupaten/Kota										
		Penyelenggaraan Olahraga Tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	23,30	26,60	29,90	33,20	36,50			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dispora	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	Penyusunan Petunjuk Teknis Standard Pembentukan dan Legalitas Komunitas Ekonomi Kreatif Kutai	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen		15,29	18,12	19,80	20,36	20,36	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pengembangan Ekosistem	Penyusunan Skema	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	Dokumen	1,00						Dispar	Bidang Perencanaan Bidang

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Kartanegara	INTELEKTUAL	Ekonomi Kreatif	Insentif Daerah										Perekonomian dan SDA
		Pemetaan Potensi Ekraf Per Kecamatan			Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Kebijakan	1,00	1,00					Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Penyelenggaraan Kontes Karya Kreatif Bertaraf Nasional			Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Bantuan Komunitas Kreatif Kukar			Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Fasilitasi Event Karya Kreatif Kecamatan			Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Operasionalisasi Gedung Cinema Kukar		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksistensi Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit							Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Operasionalisasi Gedung Ekraf							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dispar	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pembangunan Portal Ekraf Kukar sebagai Pusat Promosi Seluruh Karya Kreatif Kukar	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominf o	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Diskominf o	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Aplikasi Umum SPBE										
		Kajian Kebijakan Pengelolaa n Gedung Cinema	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen		98,00	98,25	98,50	98,75	99,00	BRIDA	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatka n dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen		98,00	98,25	98,50	98,75	99,00	BRIDA	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Kajian Berbasis Bukti	Persen		98,00	98,25	98,50	98,75	99,00	BRIDA	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkannya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah									dan Pembangunan Manusia
						Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen		98,00	98,25	98,50	98,75	99,00	BRIDA	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		1,00					BRIDA	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Pembangunan											
		Pembangunan Gedung Cinema Kukar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	Persen		71,00	71,38	71,75	72,13	72,50	Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerahnya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan			-	1,00			Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
10	Program Pelayanan Publik Cerdas	Perencanaan Pembangunan Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Persen		62,37	62,90	63,44	63,98	64,52	Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00						Dinas PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Pembangunan Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai Sakip	Nilai		75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	Kecamatan Kembang Janggut	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Samboja Barat	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		70,60	70,70	70,70	70,75	70,80	Tenggarong	Bidang Perencanaan Infrastruktur

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Tenggarong Seberang	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	Loa Kulu	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		60,75	64,37	66,03	68,07	70,37	Loa Janan	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		74,50		76,00	77,00	78,00	Muara Badak	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		76,46	76,46	76,46	76,46	76,46	Marang Kayu	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Nilai Sakip	Nilai		61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	Muara Jawa	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		74,93	77,00	77,00	77,00	77,00	samboja	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		72,50	72,00	73,00	74,00	75,00	Sebulu	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		65,00	68,00	70,00	72,00	75,00	Muara Kaman	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		69,00	70,00	70,50	70,00	70,00	Kota Bangun	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		60,75	64,37	66,03	68,07	70,37	Muara Muntai	Bidang Perencanaan Infrastruktur

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	Kenohan	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		70,12	70,45	70,63	70,85	70,85	Tabang	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	Muara wis	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		63,00	64,00	66,00	68,00	70,00	Sanga sanga	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Nilai Sakip	Nilai		70,00	70,00	70,01	70,05	70,50	Anggana	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Nilai Sakip	Nilai		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	Kota Bangun darat	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Pengadaa n Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		4,00					Kecamata n	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
					Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			20,00				Kecamata n	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Pembangun an Mini Mall Pelayanan	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN			Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamata n Kembang Janggut	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Publik di Kecamatan	PELAYANAN PUBLIK			dilaksanakan sesuai SOP									
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Samboja Barat	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tenggarong	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tenggarong Seberang	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Loa Kulu	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						dilaksanakan sesuai SOP									
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Loa Janan	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Muara Badak	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Marang Kayu	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Muara Jawa	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						dilaksanakan sesuai SOP									
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	samboja	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sebulu	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		81,25	87,50	93,75	93,75	100,00	Muara Kaman	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kota Bangun	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						dilaksanakan sesuai SOP									
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Muara Muntai	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kenohan	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tabang	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Muara wis	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						dilaksanakan sesuai SOP									
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sanga sanga	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Anggana	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kota Bangun darat	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Laporan			20,00	20,00	20,00	20,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	aan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Penyediaan Sistem Pelayanan Publik Terpadu antara Minimal Pelayanan Publik dan Mall Pelayanan Publik Kutai Kartanegara	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah	Dokumen		10,00	10,00				DPMPTSP	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Kabupaten/Kota	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dikaji dan Dimanfaatkan									
		Penetapan desain kelembagaan dan ketersediaan SDM layanan publik di Kecamatan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen		97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen		52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen		55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase pegawai	Persen		88,00	87,00	89,00	90,00	91,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						dengan SKP bernilai baik									dan Pembangunan Manusia
				Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Dukungan Sistem Informasi Terintegrasi dan Jaringan Internet	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominf o	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung	Perangkat Daerah		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	Diskominf o	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				h Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kab/Kota	dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
11	Program ASN Kukar Terbaik.	Pengembangan Gedung Diklat sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN Kutai Kartanegara	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen		27,85	28,50	30,00	33,50	36,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	Persen		80,75	81,00	81,25	82,50	81,75	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	Persen		53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase ASN yang mendapatkan	Persen		27,85	28,50	30,00	33,50	36,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						pengembangan kompetensi teknis									dan Pembangunan Manusia
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan kerjasama antar Lembaga	Dokumen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Perencanaan Pelaksanaan Diklat ASN Terprogram		Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Dokumen		1,00	1,00		1,00		BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Jabatan Administ rasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkure n Perangka t Daerah Penunjan g dan Urusan Pemerint ahan Umum	Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun									
		Penyediaan Pedoman Teknis Pelaksanaa n Beasiswa ASN Kukar	PROGRAM KEPEGAW AIAN DAERAH			Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen		97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen		52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															Pembangunan Manusia
						Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen		55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persen		88,00	87,00	89,00	90,00	91,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Pedoman Teknis Pelaksanaan Beasiswa ASN Kukar	Dokumen	1,00	1,00			1,00		BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pelaksanaan Beasiswa ASN				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	1,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Kerjasama BKPSDM dengan Lembaga Diklat secara Fokus, Terencana dan Berkesinambungan			Koordinasi dan KERJASAMA MA Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan KERJASAMA Pelaksanaan Diklat	Dokumen		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	BKPSDM	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
12	Program RT Ku-Terbaik	Penyediaan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program RT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMD	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMD	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1,00						DPMD	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hukum Adat										
		Penyusunan Regulasi pelimpahan kewenangan Kabupaten kepada Kecamatan yang diintegrasikan dengan Pelaksanaan Program RT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka		70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Indeks Zakat Nasional	Angka		0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1,00						Bagian Pemerintahan/Setkab	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Penyusunan Dokumen Rencana Lima	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONIS			Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Tahunan Program RT dan Review 2 Tahunan	ASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Renja dan Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA									dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	Laporan	1,00						Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				nan Manusia	Harmoni sasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	pada Bidang Pemerintahan									
		Penyaluran Program RT di Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan (RT di Kel)	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	Seluruh Kecamatan	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
							Laporan (RT di Desa)		2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00		
		Penyaluran Program RT	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Nilai		12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Indeks Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD	Nilai		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai		13,1997	13,1200	13,1210	13,1220	14,0000	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Penyerapan anggaran	Nilai		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan (RT)	2.393,00						BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
							Laporan (KK)								
		Penyediaan Sistem Evaluasi Pelaksanaa	PROGRAM PENGELOL AAN APLIKASI			Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggara	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominf o	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		n Program RT berbasis Digital	INFORMATIKA			kan layanan secara online									Pembangunan Manusia
				Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Diskominfo	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pembentukan dan Operasionalisasi Pengendalian dan Pendampingan Pelaksanaan Program RT	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen		10,79	16,25	17,22	21,55	27,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DPMD/Bagian Pembangunan Setkab	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.	Penyediaan Pedoman Teknis Bantuan Kepada Pengurus	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan	Angka		70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Rumah Ibadah dan Guru Ngaji serta Kelompok Keagamaan				Kesejahteraan Rakyat									
						Indeks Zakat Nasional	Angka		0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	Sekretariat Daerah	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1,00						Setkab/Kesra	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Registrasi Majelis Taklim dan Kelompok Shalawat atau Nama Lain di Wilayah Kukar						1,00						Setkab/Kesra	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pengawasan Bantuan Majelis Taklim dan Shalawat							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Setkab/Kesra	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															Pembangunan Manusia
		Pengawalan Insentif Guru Ngaji/Imam, Khotib dan Marbot							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Setkab/Kesra	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Fasilitasi Pelaksanaan Umroh Gratis							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Setkab/Kesra	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	Penyusunan Mekanisme Keterlibatan Perusahaannya Dalam Proses Peningkatan Kualitas Lingkungan di Wilayah Operasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN			Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU	Persen		19,32	20,00	20,00	20,00	20,00	DLHK	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pembinaan dan Pengawasan	Pengawasan Perizinan Berusaha	Jumlah Badan usaha dan/atau	Badan /Usaha	1,00						DLHK	Bidang Perencanaan Bidang

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan	kegiatan yang diawasi									Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Lingkungan Hidup										
		MoU Perusahaan dan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Lingkungan di Wilayah Sekitar		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan /Usaha		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
		Penyediaan Perencanaan TPA/TPST di Wilayah Kecamatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks		55,00	57,00	60,00	61,00	62,00	DLHK	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah	Dokumen	5,00	2,00					DLHK	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada									
		Pembangunan TPS3R di Kecamatan		Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	3,00	4,00	4,00	4,00				
		Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan desa Ramah Lingkungan yang terintegrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK			Persentase Masyarakat yang meningkatkan Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup	Persen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	DLHK	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Penyelenggaraan Pendidikan	Pendampingan Gerakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan	Dokumen		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	DLHK	Bidang Perencanaan Bidang

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			MASYARAKAT	n Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peduli Lingkungan Hidup	Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan									Perekonomian dan SDA
15	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.	Penyiapan standard legalitas kawasan perdesaan	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen		80,00	83,33	86,67	88,24	90,00		
				Fasilitasi kerjasama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1,00						DPMD	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pendampingan Pembentuk					Dokumen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DPMD	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		an dan Pembinaan Kelembagaan Kawasan Perdesaan													dan Pembangunan Manusia
		Penyediaan Sistem Pemantauan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Web					Dokumen		1,00					DPMD	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Penyusunan Rencana Kerja Intervensi Kawasan Perdesaan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Keselarasan Indikator dan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1,00	4,00					Bappeda	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Pemerintahan										
		Pengalokasian BKKD bagi Pembangunan Kawasan Perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Nilai		12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD	Nilai		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai		13,1997	13,1200	13,1210	13,1220	14,0000	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Penyerapan anggaran	Nilai		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola	Pengelolaan Dana bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil	Laporan		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				n Keuangan Daerah	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota									
		Pembangunan Kawasan Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B/Yang Terlayani Prasarana Pertanian	Persen		47,06	52,94	58,82	64,71	70,59	Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha		1.020,76	1.212,31	1.754,31	1.277,50		Distanak	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
16	Program Internet Desa Gratis.	Mapping Desa dengan Akses Internet	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan Informasi dan	Kemitraan Komunikasi	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif	Komunitas	1,00						Diskominfo	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dengan Komunitas Informasi Masyarakat	mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo									Pembangunan Manusia
		Penyusunan Perencanaan Teknis Penyediaan Internet Gratis Desa						1,00						Diskominfo	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Desain kebijakan keberlanjutan pengelolaan Internet Desa ke Pemerintah Desa						1,00						Diskominfo	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pembangunan Fasilitas Internet Desa Gratis	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pengelolaan E-governmen di	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelen	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan	Laporan		50,00	100,00	150,00	200,00	237,00	Diskominfo	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas									Pembangunan Manusia
17	Program Permukiman Idaman Terbaik.	Perencanaan Pembangunan PSU di Permukiman Berdasarkan Klustering Karakteristik Kondisi Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	Persen		46,41	54,85	63,29	71,73	80,17	Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1,00	6,00					Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Rehabilitasi Rumah Ibadah di Permukiman		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Pemeliharaan/Peningk			Umum di	Jumlah Lokasi PSU	Lokasi			31,94	57,21	57,21	57,21	Disperkim	Bidang Perencanaan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		atan Jalan Lingkungan			Perumahan	Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan									Infrastruktur dan Kewilayahan
		Pembangunan/Rehabilitasi Drainase				Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi							Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Pembangunan Penerangan Jalan Umum			Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Lokasi	2.248,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Penetapan Wilayah Intervensi Penataan Wilayah Sungai Prioritas	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	Persen		43,66	60,56	77,46	88,73	100,00	Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Penataan dan	Survei dan	Jumlah Dokumen	Dokumen		3,00					Disperkim	Bidang Perencanaan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									Infrastruktur dan Kewilayahan
		Penyusunan Grand Desain Kawasan Permukiman Baru di Wilayah Perkotaan		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan		1,00					Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Penyediaan Lahan	PROGRAM PENGADAA	Koordinasi Pengadaa	Koordinasi Teknis	Jumlah Data Rencana	Dokumen			1,00	1,00			Dinas Pertanaha	Bidang Perencanaan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Permukiman Rumah Layak dan Terjangkau	N TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	n Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan								n dan Tata Ruang	Infrastruktur dan Kewilayahan
		Penyediaan Lahan Pembangunan IPLT				Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen		1,00	2,00	2,00				
		Pembangunan PLTS Komunal/Solar Home System di wilayah Tak	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen		10,79	16,25	17,22	21,55	27,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Fasilitasi Tata	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberda	Bidang Perencanaan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Terjangkau PLN				Kelola Administrasi Pemerintahan Desa								yaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen		1,00					DPMD	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Pendampingan kelembagaan pengelolaan listrik dan air bersih desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga KERJASAMA antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga KERJASAMA antar Desa	Dokumen		94,00	94,00	94,00	94,00	94,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pembangunan PLTS Komunal/Solar Home System di wilayah Tak Terjangkau PLN	PROGRAM PENATAAN DESA			Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen		66,67	66,67	41,67	41,67	41,67		
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit			2,00	2,00	2,00	4,00		
		Pembangunan PLTS Komunal/Solar Home System di wilayah Tak Terjangkau PLN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Nilai		12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD	Nilai		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai		13,1997	13,1200	13,1210	13,1220	14,0000	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
						Indeks Penyerapan anggaran	Nilai		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															Perekonomian dan SDA
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan			2,00	2,00	2,00	4,00	BPKAD	Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
		Pembangunan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
						Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas rumah layak huni	Persen		0,56	40,00	60,00	80,00	100,00	Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-	25,00	25,00	5,00	5,00	5,00	Disperkim	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	12,00	69,00	70,00	40,00	40,00	33,00		
				Penerbitan Izin Pembangunan dan	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Pengembangan Perumahan	KERJASAMA Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumahan Susun Umum	KERJASAMA Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumahan Susun Umum									
		Pembangunan Pengolahan Air Bersih Desa	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	Persen		84,78	87,28	89,84	92,49	96,11	Disperkim /Urusan PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Program Dedikasi	Distribusi Intervensi Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja						OPD Utama	BIDANG PERENCANAAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	-	20,00	20,00	20,00	20,00	9,00	Disperkim /Urusan PU	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
					Perluasan Sistem Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		

Tabel 4.5 Target Kinerja Program Dedikasi

No	Program Dedikasi	KINERJA PROGRAM DEDIKASI	INDIKATOR PROGRAM DEDIKASI	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Terpenuhinya makan bergizi gratis untuk balita dan lansia	Persentase pemenuhan makan gizi gratis untuk balita dan lansia (%)	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	Terpenuhinya subsidi biaya penunjang sekolah dan beasiswa pendidikan dasar dan menengah	Persentase pemenuhan subsidi biaya penunjang sekolah dan beasiswa pendidikan dasar dan menengah	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik	Terpenuhinya bantuan sekolah swasta/pondok pesantren	Persentase pemenuhan bantuan sekolah swasta/pondok pesantren	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
4	Program Etam Sejahtera	Tercapainya kinerja program Etam Sejahtera	Persentase capaian program Etam Sejahtera	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100

No	Program Dedikasi	KINERJA PROGRAM DEDIKASI	INDIKATOR PROGRAM DEDIKASI	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
					2026	2027	2028	2029	2030
5	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera.	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Sejahtera	Persentase Pembangunan kawasan ekonomi sejahtera	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
6	Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh;	Terwujudnya Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	Persentase Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.	Tersalurkannya kredit Kukar Idaman Terbaik	Persentase kinerja kredit Kukar Idaman Terbaik	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
8	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.	Terwujudnya penguatan penggiat seni dan budaya daerah	Persentase kinerja penguatan penggiat seni dan budaya daerah	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100

No	Program Dedikasi	KINERJA PROGRAM DEDIKASI	INDIKATOR PROGRAM DEDIKASI	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
					2026	2027	2028	2029	2030
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	Terwujudnya stimulus komunitas kreatif	Persentase pemberian stimulus komunitas kreatif	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
10	Program Pelayanan Publik Cerdas	Terwujudnya Pelayanan Publik Cerdas	Persentase perwujudan pelayanan publik cerdas	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
11	Program ASN Kukar Terbaik.	Terwujudnya ASN Kukar Terbaik	Persentase perwujudan ASN Kukar Terbaik	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
12	Program RT Ku-Terbaik	Terwujudnya program RT ku Terbaik	Persentase perwujudan program RT Ku Terbaik	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.	Terwujudnya Program Terima	Persentase perwujudan program	(Capaian kinerja program	100	100	100	100	100

No	Program Dedikasi	KINERJA PROGRAM DEDIKASI	INDIKATOR PROGRAM DEDIKASI	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
					2026	2027	2028	2029	2030
		Kaseh Guru Ngaji Ku	Terima Kaseh Guru Ngaji Ku	prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%					
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	Terwujudnya lingkungan lestari	Persentase perwujudan lingkungan lestari	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
15	Program 100 Miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.	Terwujudnya program 100 Miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik	Persentase perwujudan program 100 Miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
16	Program Internet Desa Gratis.	Terwujudnya internet desa gratis	Persentase perwujudan internet desa gratis	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100
17	Program Permukiman Idaman Terbaik.	Terwujudnya permukiman Idaman Terbaik	Persentase perwujudan permukiman Idaman Terbaik	(Capaian kinerja program prioritas/jumlah seluruh program prioritas) x 100%	100	100	100	100	100

No	Program Dedikasi	KINERJA PROGRAM DEDIKASI	INDIKATOR PROGRAM DEDIKASI	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
					2026	2027	2028	2029	2030
				program prioritas) x 100%					

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya diukur melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada evaluasi terhadap indikator kinerja sasaran yang telah dirumuskan dan disepakati untuk dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan.

Penetapan indikator kinerja dilakukan secara cermat dan terstruktur dengan mempertimbangkan kondisi objektif saat ini serta dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor eksternal seperti arah kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi, perkembangan regulasi sektoral, serta tuntutan terhadap peningkatan kualitas Pembangunan berbasis data menjadi referensi utama dalam penetapan indikator kinerja. Sementara itu, faktor internal seperti kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, integrasi sistem informasi Pembangunan daerah, serta efektivitas koordinasi lintas sektor turut menjadi pertimbangan strategis dalam memastikan indikator yang ditetapkan bersifat terukur, realistis, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Sebagai instrumen utama dalam menjamin konsistensi antara arah kebijakan Pembangunan daerah dan kinerja organisasi, indikator kinerja Bappeda disusun selaras dengan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Dengan demikian, perencanaan kinerja Bappeda berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur capaian kelembagaan, tetapi juga sebagai penggerak dalam memastikan terwujudnya tata kelola Pembangunan daerah yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil.

Indikator-indikator kinerja Bappeda mencerminkan mandat dan fungsi utama organisasi, yang meliputi akurasi dalam perencanaan Pembangunan, efektivitas pengendalian dan evaluasi, penguatan pemanfaatan data dan

sistem informasi Pembangunan, serta peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator kinerja dimaksud akan disampaikan dalam bagian berikutnya, sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan pengukuran capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 2025–2029.

4.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) memainkan peran krusial sebagai jembatan yang menghubungkan visi strategis organisasi dengan hasil yang terukur di lapangan, berfungsi sebagai alat navigasi utama untuk memonitor kemajuan, mengevaluasi efektivitas program, dan memastikan akuntabilitas publik. IKU harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (*SMART*), sehingga menjadi basis kuat bagi manajemen kinerja berbasis hasil, bukan sekadar berbasis aktivitas, sekaligus menjadi landasan esensial dalam penyusunan Rencana Strategis dan penilaian kinerja tahunan.

Setiap indikator kinerja memiliki target tahunan yang harus dicapai selama periode Rencana Strategis 2025-2029, mulai dari kondisi awal hingga target akhir periode. Penetapan indikator ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur, terarah, dan berdampak nyata dalam mendukung Pembangunan daerah. Dengan adanya evaluasi kinerja secara berkala, diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mampu memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan perencanaan berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	Nilai	71,00-80,00 (Cukup Baik)	71,00-80,00 (Cukup Baik)	71,00-80,00 (Cukup Baik)	81,00-90,00 (Baik)	81,00-90,00 (Baik)	81,00-90,00 (Baik)	
2	Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP) (Nilai)	Nilai	21,91	21,97	22,02	22,07	22,13	22,19	

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi sebagai barometer esensial yang mengukur seberapa efektif dan efisien Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, terutama yang berkaitan dengan kualitas dokumen perencanaan, tingkat sinkronisasi program, dan implementasi sistem pengendalian Pembangunan daerah. IKK dirancang untuk memfokuskan sumber daya pada area yang paling kritis (*key areas*) yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian visi daerah, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data kinerja yang terukur, bukan sekadar opini atau perkiraan.

Berdasarkan Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfokus pada aspek sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah. Indikator yang ditetapkan adalah Kesesuaian antara RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penetapan target 100 persen menyiratkan komitmen dalam memastikan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diprioritaskan dalam dokumen RKPD harus sepenuhnya tercermin dan teralokasikan dalam dokumen penganggaran APBD, sehingga menghilangkan kesenjangan antara perencanaan teknokratik dan implementasi fiskal.

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja (IKK)	Satuan	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun secara optimal dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan semangat kolaborasi dari seluruh elemen Masyarakat, Renstra ini diharapkan dapat mendukung prioritas Pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah. Perencanaan yang matang ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pemerintahan bidang perencanaan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Implementasi Renstra ini diharapkan menjadi komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, demi mewujudkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan menjadi indikator keberhasilan dalam memenuhi target Pembangunan daerah. Namun, jika terdapat beberapa target yang belum tercapai, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program pada periode berikutnya. Dengan demikian, Renstra ini berperan sebagai pijakan strategis dalam mendukung Pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Seluruh unit Bagian dan Bidang yang terdiri dari Sekretariat dan Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra.
- b. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025-2029 maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.
- d. Apabila terjadi perubahan kebijakan Pembangunan baik di tingkat pusat maupun perubahan kebijakan di Kabupaten Kutai Kartanegara maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan hasil evaluasi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui :

1. Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi.
2. Pengukuran capaian kinerja, dengan membandingkan target dan realisasi indikator sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, guna menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja perangkat daerah.
4. Identifikasi permasalahan dan hambatan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pendanaan.
5. Perumusan rekomendasi dan tindak lanjut, sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkesinambungan yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Januari 2026

Plt. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara,



Sy. Vanesa Vilna SIS, S,E,M.M

197402171997032004

[illegible]



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 250/SK-BUP/HK/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta untuk lebih efektif proses penyusunan maka perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaan lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan agenda serta jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa telah diusulkan nama-nama personil yang oleh Perangkat Daerah pengusul mempunyai kemampuan untuk ditetapkan menjadi anggota Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam draft yang dilampirkan dengan Telaahan Staf yang disampaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun

- 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 91);

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan: Telaahan Staf Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-12/BAPPEDA/000.7.2.2/07/2025 tanggal 31 Juli 2025, Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;

2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra; dan
 3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
- b. Ketua:
1. mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
 2. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim;
 3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penanggung Jawab; dan
 4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
- c. Anggota:
1. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas tahun lalu;
 2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program dan kegiatan Renstra Tahun 2025-2029;
 3. melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 4. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas;
 5. merumuskan kegiatan prioritas Renstra Dinas;
 6. menampung hasil telaahan koreksi dan masukan atas Renstra masing-masing bidang;
 7. melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas hasil telaahan, koreksi dan masukan masing-masing bidang; dan
 8. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT: Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA: Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggung jawab pengelola anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

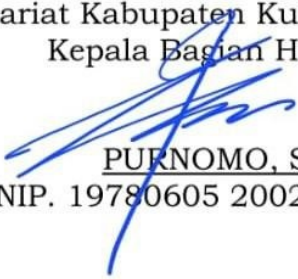
ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUERNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 250/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 8 SEPTEMBER
2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN 2029.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- II. Ketua: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- III. Anggota:
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 5. Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 6. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 8. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 9. Luhur Prasetyo, S.T.,M.Si
NIP. 197204241997031008
(Fungsional Perencana Ahli Madya)
 - 10. Suriansyah, S.Hut
NIP. 197303102000121002
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
 - 11. Indah Fitriani,S.P.,M.Si
NIP. 197707172007012027
(Fungsional Perencana Ahli Muda)

12. Maryono, S.P.,M.Si
NIP. 196903042001121001
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
13. Setiyono, S.Sos.,M.
NIP. 197402012000121004
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
14. Endi Hasary, S.T., M.T
NIP. 197709112011011001
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
15. Juliansyah, S.Sos.
NIP. 197007262010011003
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
16. Donny Adiansyah, A.Md
NIP. 197804242001121004
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
17. Yeannie Asfianti, S.P
NIP. 197811162008012026
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
18. ES Vandary Dahlina, S.T., M.T
NIP. 197510232009022001
(Penelaah Teknis Kebijakan)
19. Li'atun
NIP. 197901232009022001
(Penelaah Teknis Kebijakan)
20. A. Fahriah Hanim,A,Ma,S.Pd.I
NIP. 197403142008012013
(Pengolah Data dan Informasi)
21. Fachrul Rozi
NIP. 198503172010011024
(Pengolah Data)
22. Ferri Azwar
NIP. 198101232010011022
(Pengolah Data dan Informasi)
23. Beny Novari
NIP.198311092009011004
(Pengolah Data)

24. Teddy Irawan, S.St.,M.M
NIP. 198404292009031002
(Analisis Perencanaan)
25. Duddy Mahendra, S.Sos
NIP. 198606282011011002
(Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
26. Alamsyah, SE
NIP. 197403272007011022
(Penata Laporan Keuangan)
27. Hairullah
NIP. 197812062007011008
(Pengelola Data)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

